

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEKITAR KAWASAN HUTAN

Dr. Sarintan Efratani Damanik, M.Si

Uwais Inspirasi Indonesia

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEKITAR KAWASAN HUTAN

ISBN : 978-623-227-211-8
Penulis : Dr. Sarintan Efratani Damanik, M.Si
Tata Letak : Funky
Design Cover : Haqi

15,5 cm x 23 cm
vi + 136 halaman
Cetakan Pertama, November 2019

Diterbitkan Oleh:

Uwais Inspirasi Indonesia

Anggota IKAPI Jawa Timur Nomor: 217/JTI/2019 tanggal 1 Maret 2019

Redaksi:

Ds. Sidoarjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo

Email: Penerbituwais@gmail.com

Website: www.penerbituwais.com

Telp: 0352-571 892

WA: 0812-3004-1340/0823-3033-5859

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Buku Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan merupakan tulisan yang disarikan penulis berdasarkan pengalaman penulis selama tenaga ahli di ITTO (International Trade Timber Organization) di Kabupaten Humbahas. Buku ini dapat juga digunakan sebagai penunjang mata kuliah Penyuluhan Kehutanan dan Sosiologi Kehutanan. Dengan buku ini diharapkan pembaca mengetahui secara mendasar yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat desa sekitar kawasan hutan dan tulisan ini juga untuk mendalami ilmu tentang pemberdayaan masyarakat desa yang rentan dengan kemiskinan.

Pengkajian materi buku ini, maka dalam penulisannya dimulai dari Konsep dan Teori Pemberdayaan, Kondisi Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan, Potensi Masyarakat Desa Sebagai Pelaku Perubahan, Tahapan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kawasan Hutan, Penyuluhan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan dan Penutup.

Buku ini dibutuhkan oleh setiap pembaca yang mempelajari tentang pemberdayaan masyarakat desa sekitar kawasan hutan. Buku ini akan selalu di evaluasi sehingga diharapkan pada akhirnya buku ini lebih sempurna dan dapat diandalkan. Semoga tulisan ini bermanfaat, kritik dan saran berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan tulisan ini sangat diharapkan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Pematangsiantar, Oktober 2019

Penulis

Dr. Sarintan Efratani Damanik, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB 1. KONSEP, TEORI DAN MANFAAT	
PEMBERDAYAAN.....	1
1. Konsep Pemberdayaan.....	1
2. Teori Pemberdayaan.....	5
A. Pengertian Teori.....	5
B. Peranan Teori.....	6
3. Manfaat Pemberdayaan.....	8
BAB II. KONDISI MASYARAKAT DESA	
SEKITAR KAWASAN HUTAN.....	11
1. Kondisi Sosial.....	11
2. Kondisi Ekonomi.....	15
3. Tingkat Pendidikan.....	17
4. Penggunaan Lahan.....	19
5. Perambahan Hutan.....	21
BAB III. POTENSI MASYARAKAT DESA	
SEBAGAI PELAKU PERUBAHAN.....	23
1. Potensi Masyarakat Desa.....	23
A. Desa.....	23
B. Masyarakat Desa.....	27
C. Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan.....	32
D. Masyarakat sebagai Potensi.....	33
2. Masyarakat Desa sebagai Pelaku	
Perubahan.....	39

BAB IV. TAHAPAN DAN STRATEGI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

KAWASAN HUTAN	44
1. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	44
2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa	
Kawasan Hutan	52
A. Pengembangan Ekonomi	52
B. Pembangunan Sosial Budaya	
Masyarakat Desa	57
C. Pengembangan Lingkungan.....	69
D. Penyuluhan	73

BAB V. PENYULUHAN MASYARAKAT

SEKITAR KAWASAN HUTAN	80
1. Penyuluhan Masyarakat.....	80
A. Konsep Penyuluhan.....	80
B. Penyuluhan Kehutanan.....	84
C. Tujuan Penyuluhan Kehutanan.....	87
D. Pedoman Penyuluhan Kehutanan	88
2. Landasan Hukum Penyuluhan	
Kehutanan	89
3. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan	
Penyuluhan Kehutanan.....	91
A. Azas prioritas pembangunan	91
B. Keterpaduan dan pemberdayaan	92
C. Paradigma penyuluhan kehutanan	92
D. Visioner dan berkelanjutan	92
4. Perencanaan Penyuluhan Kehutanan	93
A. Program Penyuluhan Kehutanan	93
B. Jenis dan Mekanisme Penyusunan	
Rencana.....	96

C. Program Penyuluhan Kehutanan (PPK).....	98
D. Tugas Pokok Penyuluh.....	98
5. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan	99
A. Metode, Materi Dan Kegiatan Pokok	99
B. Lembaga Penyuluhan Kehutanan.....	104
C. Sumber Daya Manusia Penyuluhan Kehutanan	108
D. Pengembangan Jejaring Kerja.....	117
E. Forum Komunikasi Penyuluhan Kehutanan	119
F. Sumberdaya Pendukung.....	120
 BAB VI. PENUTUP.....	 121
Daftar Pustaka.....	125
Tentang Penulis	136

BAB 1

KONSEP, TEORI DAN MANFAAT PEMBERDAYAAN

1. Konsep Pemberdayaan

Konsep merupakan abstraksi atau ide yang dapat digambarkan tentang mental yang dibuat dalam suatu simbol maupun kata. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan, berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosial di masyarakat atau kelompok yang meliputi penguatan-penguatan modal sosial, patuh akan aturan, dan jaringan, modal sosial yang kuat maka kita akan mudah mengarahkan dan mengatur masyarakat serta mudah mentransfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Dengan memiliki modal sosial yang kuat maka kita akan dapat menguatkan *knowledge*, *money*, dan *people*. Konsep ini mengandung arti bahwa konsep pemberdayaan masyarakat adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial kelompok untuk menjadikan kelompok produktif untuk mencapai kesejahteraan sosial. Modal sosial yang kuat akan menjamin keberlanjutan di dalam membangun rasa kepercayaan di dalam masyarakat khususnya anggota kelompok. Ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai modal sosial dan kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan

dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat kelompok tersebut.

Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka tetap memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi :

1) Kebutuhan dasarnya

Masyarakat sudah pasti memiliki kebutuhan dasar, sehingga mereka dapat memiliki satu kebebasan dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kemiskinan, bebas dari kebodohan dan juga bebas dari kesakitan

2) Menjangkau segala sumber produktif

Dengan adanya sumber yang produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan segala sumber produktif yang memungkinkan agar dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh kebutuhan barang-barang dan jasa segala sumber produktif yang memungkinkan agar dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh kebutuhan barang-barang dan jasa yang mereka perlukan.

3) Mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan keputusan yang mempengaruhi.

Pengembangan yang dilakukan oleh masyarakat bukan sebatas teori saja, tetapi bagaimana mengembangkan suatu daerah pedesaan dan tetap memiliki arti dan kemungkinan untuk berkembang berada di tingkat masyarakat. Pembangunan masyarakat seharusnya mencerminkan tindakan masyarakat dan kesadaran atas identitas diri. Oleh

karena itu, komitmen untuk pengembangan masyarakat harus mengenali keterkaitan antara individu dan masyarakat di mana mereka berada. Memenuhi kebutuhan masyarakat adalah sebuah fenomena struktural dan bahwa sifat struktural dari kelompok atau masyarakat memiliki efek pada cara orang bertindak, merasa dan berpikir. Tapi ketika kita melihat struktur tersebut, mereka jelas tidak seperti kualitas fisik dari dunia luar. Mereka bergantung pada keteraturan reproduksi sosial, masyarakat yang hanya memiliki efek pada orang-orang sejauh struktur diproduksi dan direproduksi dalam apa yang orang lakukan. Oleh karena itu pengembangan masyarakat memiliki epistemologis logis dan yang dasar dalam kewajiban sosial yang masing-masing individu memiliki rasa tanggungjawab terhadap masyarakat yang harus dikembangkan baik bakat yang ada pada mereka.

Pemberdayaan yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak yang berupa akal budi, ikhtiar atau upaya untuk memulihkan maupun untuk meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat. Pemberdayaan merupakan proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat akan berhasil bila masyarakat tersebut mau ikut berubah dan berpartisipasi pada program-program yang ditawarkan.

Pada pemberdayaan pendekatan proses lebih dapat memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam

pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam program membuat masyarakat tidak semata-mata hanya sebagai konsumen, melainkan juga sebagai produsen karena telah terlibat dalam proses pembuatan dan perumusan, sehingga masyarakat ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya. Karena komunikasi dapat berlangsung secara efektif akan menimbulkan partisipasi masyarakat juga semakin aktif terutama dalam pengembangan masyarakat. Juga mengungkapkan bahwa ketika kelompok masyarakat yang terlibat dalam strategi komunikasi, membantu mereka mengambil kepemilikan inisiatif pembangunan masyarakat dari pada melihat diri mereka sebagai penerima manfaat pembangunan serta agen pengembangan masyarakat harus terlibat dalam komunikasi yang jelas sehingga dapat meminta partisipasi anggota masyarakat dalam isu-isu pembangunan.

Pengembangan masyarakat tidak khusus hanya pada masalah ekonomi, teknis atau infrastruktur. Ini adalah masalah kecocokan dukungan eksternal yang ditawarkan oleh agen pembangunan pedesaan dengan karakteristik internal sistem pedesaan itu sendiri. Oleh karena itu, agen pembangunan pedesaan harus belajar secara teori, peran pemerintah pusat dan agen luar lainnya harus menginspirasi inisiatif lokal bahwa hal itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat yaitu keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk berubah menjadi lebih baik, dan masyarakat juga diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi

terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya, upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik, hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan dimana peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan luaran kinerja yang lebih baik. Siklus pemberdayaan ini menggambarkan proses mengenai upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan kearah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi.

2. Teori Pemberdayaan

A. Pengertian Teori

Teori merupakan sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis melalui pengkhususan hubungan secara empiris. Teori yang ada tentang pemberdayaan masyarakat dapat memberikan petunjuk apa yang sebaiknya yang akan dilakukan dalam situasi tertentu. Teori dapat dalam bentuk luas atau ringkas mengenai pola pola interaksi dalam masyarakat atau menggambarkan pola yang terjadi dalam situasi tertentu

Sebuah teori dalam pemberdayaan masyarakat dapat ditemukan atau diungkap yaitu teori yang sudah ada atau ditemukan diawal kemudian dilakukan penelitian pemberdayaan pada masyarakat. Pendekatan kedua yaitu yang belum ada atau masih diduga dan untuk penyusunannya dilakukan penelitian pemberdayaan pada masyarakat.

B. Peranan Teori

Teori dalam praktek pemberdayaan masyarakat menggambarkan distribusi kekuasaan dan sumberdaya dalam masyarakat, bagaimana fungsi-fungsi organisasi dan bagaimana sistem dalam masyarakat mempertahankan diri. Teori yang ada dalam pemberdayaan masyarakat mengandung arti hubungan sebab dan pengaruh yang dapat diuji secara empiris. Hubungan sebab dan akibat yang terjadi karena aksi tertentu akan dapat memunculkan jenis intervensi yang dapat digunakan oleh pekerja sosial atau LSM dalam memproduksi hasil. Dalam kerja sosial, kita dapat menggunakan teori untuk menentukan jenis aksi atau intervensi yang dapat digunakan untuk memproduksi hasil. Pada umumnya beberapa teori digabung untuk memproduksi model *outcome* :

- 1) Teori ketergantungan kekuasaan : kekuasaan merupakan kunci konsep untuk memahami proses pemberdayaan. Kekuasaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari interaksi sosial dan fitur yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial. Hal ini selalu menjadi bagian dari hubungan, dan tanda-tanda yang dapat dilihat bahkan pada interaksi.
- 2) Teori sistem : perubahan sosial pada masyarakat seperti halnya pertumbuhan pada makhluk hidup. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya dan mampu bertahan dalam (a) menanggulangi situasi eksternal dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, (b) mencapai tujuan utamanya, (c) sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian

yang menjadi komponennya (d) melengkapi, memelihara dan memperbaiki motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Dalam aspek pemberdayaan masyarakat, teori sistem sosial akan mengarah pada suatu kekuatan yang dimiliki kelompok agar kelompok tersebut memiliki massa. Bila kelompok memiliki massa yang besar maka akan mampu bertahan serta berkembang menjadi lebih luas dan besar, maka kelompok masyarakat tersebut dikatakan berdaya.

- 3) Teori Ekologi : organisasi merupakan sesuatu yang telah melekat dalam kehidupan kita, karena kita adalah makhluk sosial. Kita hidup di dunia tidaklah sendirian, melainkan sebagai manifestasi makhluk sosial, kita hidup berkelompok, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Struktur organisasi merupakan kerangka antar hubungan satuan-satuan organisasi yang di dalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu. Struktur organisasi lebih mudah dibaca, dimengerti dan dianalisis dalam bentuk bagan organisasi. Seseorang masuk dalam sebuah organisasi tentu dengan berbagai alasan karena kelompok akan membantu beberapa kebutuhan atau tujuan seperti perlindungan, pergaulan, kekuasaan dan pemenuhan sandang pangan. Dengan berbagai tujuan tersebut kehidupan saling berpengaruh antar orang jauh lebih bermanfaat daripada kehidupan sendiri.
- 4) Teori Konflik : Konflik akan selalu ada dan terus menerus muncul setiap waktu, baik terutama dalam level kehidupan kelompok masyarakat. Dalam interaksi, semua pihak bersinggungan dan sering melahirkan konflik. Belajar dari konflik yang kemudian disadari menghasilkan kerugian para

pihak akan memunculkan inisiatif meminimalisir kerugian itu. Caranya adalah mengupayakan damai untuk kembali hidup bersama.

- 5) Teori Mobilisasi Sumberdaya : Pemberdayaan masyarakat dalam teori mobilisasi menjadi salah satu dasar yang kuat, karena untuk menjadi seorang atau kelompok masyarakat yang berdaya atau memiliki kekuatan selain uang, ilmu pengetahuan maka masyarakat juga mempunyai peranan yang penting, sehingga sekumpulan orang akan memberikan kekuatan pada suatu wilayah dan kekuatan itu akan memberikan kekuatan pada masyarakat tersebut.

3. Manfaat Pemberdayaan

Pemberdayaan di lingkungan muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah.

Pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi yang ada pada saat ini, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pemberdayaan merupakan suatu kegiatan meningkatkan kekuasaan kepada masyarakat yang kurang beruntung secara berkesinambungan, dinamis, serta berupaya untuk membangun daya itu untuk mendorong, memotivasi dan membangkitkan

kesadaran masyarakat agar ikut serta terlibat dalam mengelolah semua potensi yang ada secara evolutif.

Manfaat dilakukan pemberdayaan masyarakat desa adalah :

- 1) Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Potensi terhadap kemandirian individu yang perlu diberdayakan, yang bersumber dari proses kemandirian tiap individu yang meluas kekeluarga, kelompok serta masyarakat.
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sasaran yang baik fisik di bidang irigasi, jalan, dan listrik. Maupun bidang sosial sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbentuknya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga di bidang pendanaan, pelatihan, dan pemasaran. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini yang paling terpenting antara lain adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.
- 3) Memberdayakan masyarakat dengan maksud melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah di bidang sosial ekonomi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau mungkin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat

mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

Pemberdayaan masyarakat desa juga dimaknai sebagai sebuah proses dengan tujuan ; (1) Sebagai proses, pemberdayaan dalam serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. (2) Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yaitu bersifat fisik, aspek ekonomi dan sosial seperti kepercayaan diri, dalam menyampaikan aspirasi, memiliki mata pencaharian, ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat dan mampu mandiri dalam melaksanakan semua tugas-tugas dalam kehidupannya.

BAB 99

KONDISI MASYARAKAT DESA SEKITAR KAWASAN HUTAN

1. Kondisi Sosial

Masyarakat pedesaan terdiri dari masyarakat yang homogeni dengan sistem nilai yang sama. Kehidupan senantiasa rukun, saling mengerti dan saling bantu membantu di antara anggota-anggotanya. Mempertahankan kelompok dan nilai-nilainya adalah lebih penting daripada individu. Masyarakatlah yang utama sedang perseorangan harus tunduk kepadanya. Kepentingan pribadi harus di bawah kepentingan masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat desa, gotong-royong merupakan suatu sistem pengerahan tenaga tambahan dari luar kalangan keluarga, untuk mengisi kekurangan tenaga pada masa-masa sibuk dalam lingkaran aktifitas produksi bercocok tanam. Dalam kelompok lain sebagai petani, tuan rumah harus menyediakan makan siang setiap hari kepada teman-temannya yang sedang membantu, selama pekerjaannya berlangsung. Di desa masyarakat selalu melakukan aktivitas tolong-menolong antara tetangga yang tinggal berdekatan, untuk pekerjaan-pekerjaan kecil sekitar rumah dan pekarangan, misalnya: menggali sumur, membangun rumah, dan sebagainya. Aktivitas spontan tanpa permintaan dan tanpa pamrih untuk membantu secara

spontan pada waktu seorang penduduk desa mengalami kematian atau bencana.

Masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan pada umumnya sangat bergantung pada sumberdaya hutan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan ekonomi dan budayanya. Baik yang memanfaatkan secara langsung ataupun tidak langsung dari hasil hutan tersebut. Sebagian dari mereka melakukan kegiatan budidaya pertanian di dalam kawasan hutan. Sebagian masyarakat mengambil hasil hutan non kayu seperti rotan, getah kayu, sarang burung serta obat-obatan secara lestari. Sebagian lainnya adalah mencari kayu bakar, menyabit rumput, atau menggembalakan ternaknya di dalam kawasan hutan.

Masyarakat yang berada di kawasan hutan baik yang berada di sekitar dan di dalam hutan pada umumnya adalah masyarakat yang tertinggal baik kondisi sosial ekonomi, pendapatan masyarakat masih rendah. Ini terjadi karena adanya pengabaian kepentingan masyarakat sekitar dan program pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan. Selama ini upaya mensejahterakan masyarakat setempat belum berhasil dan belum secara cepat mengakomodasi kepentingan sosial, budaya dan ekonomi.

Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan meningkat pula kebutuhan akan lahan untuk berbagai kepentingan. Kebutuhan yang meningkat tersebut mengancam keberadaan hutan. Kebutuhan akan lahan yang semakin meningkat mengakibatkan pembukaan lahan hutan semakin meningkat. Perambahan hutan dilakukan oleh masyarakat untuk memperluas usaha tani dan ini membuat kawasan hutan beralih fungsi dan

masyarakat juga mengikuti pola lama sistem ladang berpindah, kawasan hutan yang sudah ditebang di mana lahan yang ada akan diusahakan selama tanah tersebut masih subur. Petani yang melakukan perambahan hutan untuk usaha pertanian telah dilakukan secara turun temurun baik di luar maupun di kawasan hutan.

Kedekatan serta ketergantungan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan dengan hutan tersebut, menyebabkan adanya interaksi masyarakat dengan hutan di sekitarnya. Pada awalnya interaksi-interaksi tersebut terjadi dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian alam, tetapi dengan semakin berkembangnya peradaban dan kebutuhan, maka interaksi yang terjadi antara masyarakat dengan hutan sudah mulai bergeser. Bahkan bukan hanya masyarakat yang dekat dengan hutan lagi yang melakukan interaksi dengan hutan, tetapi ada kelompok-kelompok tertentu yang melakukan perambahan hutan.

Faktor adanya perambahan hutan di antaranya (1). Faktor ekonomi, pada umumnya masyarakat desa sekitar kawasan hutan sumber mata pencaharian mengandalkan sektor pertanian dan hasil hutan non kayu. (2). Faktor pendidikan dan pengetahuan, para perambah hutan pada umumnya berpendidikan rendah, sehingga menyebabkan rendahnya penyerapan anggota masyarakat terhadap informasi yang didengar atau dilihatnya. Tingkat pendidikan yang rendah ini menyebabkan teknologi budidaya pertanian yang mereka lakukan masih tradisional, diturunkan dari orang tua mereka. (3). Faktor kesuburan tanah, tingkat kesuburan tanah yang cukup tinggi, dan juga karena keterbatasan lahan yang ada, menyebabkan masyarakat petani yang merasa kekurangan lahan tergiur untuk membuka atau merambah hutan, khususnya yang berdekatan dengan lahannya.

(4). Dengan adanya oknum tertentu yang mendukung dalam hal perambahan hutan yang sudah menjadi rahasia umum, bahwa terjadinya perambahan hutan terutama pencurian kayu tidak dapat berjalan kalau hanya sepihak saja tetapi ada pihak lain, khususnya kepentingan akan kayu, pihak lain yang ikut bekerjasama sehingga perambahan hutan dapat berjalan dengan lancar. Penebangan dan pencurian kayu dilakukan oleh masyarakat karena ada pihak-pihak yang menampungnya, bahkan menjadi sponsor karena tidak jarang masyarakat menerima uang muka terlebih dahulu sebelum melakukan pencurian kayu. Kegiatan perambahan hutan kebanyakan dengan melakukan penebangan liar serta pencurian kayu secara modern dengan memakai alat-alat mesin sehingga lahan dengan cepat dapat beralih fungsi (5). Keterbatasan jumlah dan keahlian petugas pengawas hutan, maraknya pencurian kayu serta perambahan yang terjadi juga disebabkan oleh sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mengawasi kawasan hutan. Keterbatasan jumlah petugas pengawas hutan di daerah ini ternyata juga tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperti sarana telekomunikasi dan transportasi. (6). Perambahan hutan dan pencurian kayu terus berlangsung karena masyarakat yang memiliki usaha kecil perkayuan di sekitar hutan memiliki ijin dari Dinas Kehutanan, namun tetap merambah hutan secara ilegal atau berkedok dengan alasan memiliki ijin resmi. Masyarakat telah mengetahui hal tersebut, namun mereka masih beranggapan bahwa tidak salah dalam melakukan perambahan dan pencurian. Sehingga masyarakat tidak merasa ragu dan takut dalam melakukan perambahan karena masyarakat merasa masih sebatas yang wajar, ini disebabkan kurangnya informasi tentang dampak kerusakan hutan.

Ketergantungan masyarakat yang cukup tinggi terhadap hasil hutan adalah dalam hal kayu bakar. Pada umumnya masyarakat di desa sekitar kawasan hutan masih menggunakan kayu bakar untuk memasak karena biaya untuk membeli minyak tanah cukup mahal dan gas masih merupakan barang sangat mahal. Sumber kayu bakar awalnya berasal dari kebun mereka, tetapi karena persediaannya makin lama makin habis, maka masyarakat akhirnya harus mencari ke hutan terdekat. Masyarakat yang mempunyai ketergantungan cukup besar terhadap kayu bakar dari hutan.

2. Kondisi Ekonomi

Masyarakat memiliki andil untuk memanfaatkan hutan sebagai sumber peningkatan perekonomian mereka, dilihat dari pola hubungan saling ketergantungan antara manusia dan hutan dalam suatu interaksi sistem kehidupan adalah keniscayaan. Oleh karena pengelolaan dan pemanfaatan hutan bagi masyarakat penting untuk dilakukan upaya-upaya yang mampu meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan turut serta memanfaatkan ketersediaan sumberdaya alam setempat.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan tingkat sosial ekonomi masyarakat dari sumberdaya alam terhadap masyarakat setempat agar masyarakat ikut berperan dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam yang ada di sekitarnya. Pendapatan rumah tangga yang dimaksud yaitu besarnya pendapatan yang diterima oleh anggota keluarga dalam satu rumah tangga dari pekerjaan pokok ditambah pekerjaan sampingan setiap bulan. Pendapatan rumah tangga bermanfaat untuk mengetahui kecukupan suatu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pendapatan rumah tangga masyarakat berasal dari sektor

pertanian dan non pertanian. Pertanian merupakan sektor yang paling dominan dalam pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga masyarakat. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang paling utama dalam rumah tangga oleh karena itu masyarakat sebagian besar mengusahakan lahan sawah dan ladang untuk dikonsumsi oleh keluarga sendiri. Selain dari persawahan pendapatan dari sektor pertanian juga berasal dari kebun campuran, hasil dari kebun campuran berupa kayu bulat, buah, palawija dan getah karet.

Pengaruh kondisi sosial ekonomi masyarakat desa hutan terhadap hutan mencakup berbagai kehidupan, berupa ketergantungan ekonomi, kawasan buru untuk kebutuhan protein, areal perladangan dan perkebunan, bahan bangunan, dan fungsi lain yang berhubungan dengan kelembagaan sosial tradisional di masyarakat. Indikator sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan sangat erat hubungannya dengan kegiatan perambahan hutan yang terjadi saat ini.

Kriteria faktor sosial ekonomi yang paling relevan penyebab perambahan hutan. Hasil hutan sangat bernilai ekonomi bagi kehidupan masyarakat, baik itu secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat dan sekitar kawasan hutan, dengan adanya pendapatan tersebut untuk menambah kebutuhan sehari-hari masyarakat, dalam masyarakat di sekitar hutan dan dalam hutan. Pendapatan masyarakat merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan. Rendahnya tingkat pendapatan di pedesaan tidak terlepas dari produktivitas yang rendah, kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani. Aspek ekonomi desa dan peluang kerja berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat. Ekonomi pedesaan ditentukan oleh pola berusaha dari masyarakatnya. Dengan adanya usaha

pertanian, kehutanan, peternakan serta perikanan merupakan mata pencaharian utama masyarakat pedesaan sekitar kawasan hutan

Motivasi para perambah untuk melakukan perambahan adalah untuk makan dan biaya sekolah anak-anaknya. Sementara pola penggunaan lahan rambahan ditentukan oleh faktor-faktor kebiasaan orang tua, tidak punya pilihan lain, tidak mempunyai lahan, sulitnya mencari pekerjaan, lahannya subur, lahan rambahan dekat dengan tempat tinggal, dan kemudahan dalam memasarkan hasil panen. Alasan utama masyarakat menggarap lahan hutan di sekitar tempat tinggal mereka adalah keterbatasan lahan garapan dan rendahnya pendapatan. Sekarang banyak terjadi penyerobotan lahan hutan. Kemungkinan besar hal ini terjadi karena mereka tidak segera melihat adanya kesempatan yang disediakan kehutanan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sekarang ini mereka melihat ketidakjelasan, ketidakpastian, padahal mereka sudah sangat membutuhkan, dan akhirnya jalan yang paling pintas adalah mencuri, merambah, dan menyerobot lahan hutan.

Masyarakat yang mengambil kayu, bambu, rotan dari hutan untuk dipergunakan sebagai bahan bangunan, kerajinan anyam-anyaman atau untuk dijual. Hal ini disebabkan mereka memerlukan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak mencukupi hanya mengandalkan hasil pertanian atau buruh

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses yang menata individu maupun sekelompok orang untuk hidup lebih baik dari sebelumnya, berlangsung sepanjang hayat mulai dari kandungan hingga

dewasa dan sampai mati diperoleh melalui keluarga, teman, guru, sekelompok orang atau masyarakat sekitar.

Tingkat pendidikan masyarakat juga dapat berpengaruh terhadap tingkat pemanfaatan sumberdaya hutan. Hal ini terkait dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, penguasaan teknologi, keterampilan, dan informasi pasar yang diperoleh. Tingkat pendidikan yang rendah, penguasaan teknologi dan keterampilan yang terbatas, serta kurangnya informasi pasar menyebabkan pemanfaatan sumberdaya hutan terutama untuk jenis-jenis komersil menjadi tidak terkendali. Hal ini akan berdampak negatif terhadap kelestarian sumberdaya hutan tersebut. Terbatasnya teknologi dan keterampilan yang dimiliki menyebabkan rendahnya kemampuan untuk menghasilkan produk baru maupun produk olahan yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi. Kurangnya informasi pasar yang dimiliki menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap jenis-jenis sumberdaya hutan tertentu.

Secara umum masyarakat yang tinggal di sekitar hutan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini disebabkan tingkat perekonomian masyarakatnya rendah dan tidak adanya fasilitas pendidikan yang lebih lanjut di daerahnya. Masyarakat desa sekitar hutan mempunyai ciri antara lain tingkat pendidikan rendah, ketrampilan kerja di luar bidang pertanian yang terbatas serta kurangnya modal dan teknologi dalam kegiatan pertanian. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan.

Tingkat pendidikan yang rendah dan adanya persepsi masyarakat yang menganggap hutan sebagai sumberdaya alam yang bebas dimiliki dan dipergunakan semakin mendorong masyarakat sekitar hutan untuk menyerobot lahan hutan. Salah

satu faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan terhadap hutan oleh masyarakat sekitar hutan seperti perambahan lahan hutan adalah pengetahuan masyarakat itu sendiri rendah tentang kawasan hutan. Pengetahuan merupakan informasi yang disimpan dalam bentuk ingatan dan menjadi penentu utama perilaku seseorang. Pengetahuan dan pengalaman akan membentuk sikap seseorang. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai kawasan hutan dan fungsi hutan akan mempengaruhi sikap mereka terhadap hutan yang kemudian akan tercermin pada interaksinya dengan hutan, terutama kaitannya dengan aktivitas perambahan lahan hutan yang mereka lakukan

Penyebab hancurnya hutan saat ini disinyalir akibat dari kondisi masyarakat sekitar hutan yang miskin dan berpendidikan rendah, hilangnya budaya berhutan oleh masyarakat, serta diikuti oleh kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil. Kondisi demikian semakin mewarnai wajah pengelolaan hutan yang selama ini dirasakan kurang memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan pengembangan masyarakat lokal

4. Penggunaan Lahan

Berdasarkan letak lokasinya, kebun masyarakat dibagi menjadi dua kelompok, yakni kebun yang terletak di dalam kawasan hutan lindung dan di luar kawasan hutan lindung. Perlakuan untuk kebunnya, baik yang di dalam atau di luar hutan, relatif sama. Pada setiap kebunnya dibangun pondok atau gubuk untuk beristirahat dan lapangan terbuka. Bagi petani di desa ini, kebun dan pondoknya merupakan rumah kedua bagi mereka. Aktivitas harian mereka berada di kebun, terlebih-lebih pada saat musim panen, mereka tidak pulang ke desanya. Kegiatan sehari-harinya memanen kopi dan menjemur sampai kopinya siap dijual.

Kebun yang terdapat di luar kawasan hutan umumnya hanya ditanami tanaman pokok kopi dan tanaman pengisi lainnya seperti jahe, lada, dan tanaman sayuran. Pada lahan ini tidak ditemukan jenis tanaman pohon karena jenis tanaman pohon akan menaungi tanaman kopinya. Untuk kebun yang berada di dalam kawasan hutan, sesuai arahan dari program Hutan Kemasyarakatan (HKM), selain ditanami tanaman kopi, juga ditanami tanaman pohon sebagai penguat tanah.

Di kebun, tanaman kopi merupakan tanaman pokok masyarakat sebagai sumber pendapatan utama. Jenis tanaman lainnya seperti jahe, lada, dan tanaman sayuran hortikultura hanya sebagai sumber penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tanaman padi, palawija dan sayuran biasanya mempunyai musim-musim tertentu. Sebagai gambaran kalender musim untuk tanaman padi, palawija dan sayuran. Sedangkan jenis ternak yang dikembangkan oleh masyarakat dalam usaha tani adalah ayam kampung, ayam ras, itik, domba, kambing, sapi dan kerbau.

Tata niaga hasil usaha tani umumnya dilakukan dengan cara menjual kepada pedagang pengumpul atau tengkulak. Sedikit sekali petani yang menjual langsung ke pasar karena selain keterbatasan sarana transportasi dan volume hasil yang tidak terlalu besar juga dikarenakan dalam memenuhi kebutuhan modalnya, banyak para petani yang mendapat pinjaman dari tengkulak dengan catatan hasil panen tidak boleh dijual kepada orang lain. Harga jualnya lebih rendah dari harga pasar sehingga pendapatan petani pun semakin kecil. Selanjutnya tengkulak menjual hasil usaha tani tersebut ke pasar-pasar induk.

5. Perambahan Hutan

Penduduk di sekitar kawasan konservasi terus bertambah, sehingga jumlah petani dengan sendirinya pun terus meningkat. Hal ini berarti kebutuhan lahan bagi penduduk sekitar kawasan konservasi hutan semakin besar. Salah satu konsekuensi dari jumlah penduduk yang terus meningkat adalah penambahan angkatan kerja. Apabila jumlah angkatan kerja tidak seimbang dengan penyediaan lapangan pekerjaan maka pengangguran akan meningkat. Akibatnya ketergantungan masyarakat terhadap hutan semakin meningkat sehingga pemukiman dan perladangan liar bermunculan di mana-mana dengan luas yang semakin meningkat pula. Jumlah anggota keluarga juga berpengaruh terhadap luas lahan yang digarap.

Persepsi masyarakat desa sekitar kawasan hutan memberikan arti untuk seseorang bertindak, sehingga dalam kasus perambahan lahan hutan persepsi masyarakat terhadap keberadaan hutan akan menentukan tingkat perambahan lahan hutan yang akan dilakukan, dan masyarakat sekitar hutan memandang hutan sebagai sumber kehidupan juga sebagai cadangan bagi perluasan lahan usaha tani mereka ketika mereka membutuhkan tambahan lahan usaha tani yang diakibatkan oleh pertambahan jumlah penduduk.

Maraknya perambahan hutan mengakibatkan terjadinya degradasi hutan dalam bentuk meluasnya lahan kritis. Kondisi tersebut menyebabkan menurunnya daya dukung hutan terhadap lingkungan seperti penyediaan kebutuhan air bersih, berkurangnya daya serap hutan terhadap gas rumah kaca ancaman bahaya banjir dan tanah longsor, dan perbagai bentuk penurunan kualitas lingkungan hidup.

Sampai sekarang kemiskinan masyarakat sekitar hutan terus menjadi masalah klasik yang tak kunjung tuntas. Permasalahan kemiskinan ini terutama disebabkan oleh minimnya akses masyarakat dengan dunia luar, kurangnya pemahaman tentang pengelolaan hutan, mengakibatkan semakin luasnya lahan kritis di dalam dan sekitar kawasan hutan akibat ulah masyarakat. Untuk itu dibutuhkan kebijakan yang lebih bersifat pro terhadap pengentasan kemiskinan, khususnya bagi masyarakat desa sekitar kawasan hutan.

BAB 999

POTENSI MASYARAKAT DESA SEBAGAI PELAKU PERUBAHAN

1. Potensi Masyarakat Desa

A. Desa

Desa adalah satu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa dalam melaksanakan pemerintahan dan merupakan bagian yang penting dari suatu masyarakat yang tidak dapat terpisahkan dari organisasi pemerintah yang berhubungan dan berhadapan langsung dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan penting dan strategis, khususnya tugas di bidang pelayanan publik. Usur kepentingan yang sangat mutlak diperlukan guna penguatan ekonomi desa menuju kemandirian desa.

Mandiri didefinisikan sebagai keadaan di mana satu pihak dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak-pihak lain. Namun, kemandirian juga dinyatakan sebagai prespektif yang sama sekali berbeda dengan saling ketergantungan. Kondisi saling ketergantungan mensyaratkan kolaborasi dan sinergitas multi pihak. Arah dan ukuran keberhasilan pembangunan kini akan sangat ditentukan seberapa besar irisan sinergi dapat dilakukan oleh tiga pihak pelaku pembangunan yaitu pemerintah, sektor usaha dan masyarakat, dalam ruang kesetaraan dialog yang cukup

luas bagi begitu kompleksnya permasalahan dan kondisi yang sesungguhnya kini dihadapi masyarakat.

Kemandirian desa merupakan harapan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, karena saat ini sudah banyak pemerintahan di daerah yang menerapkan otonomi daerah dimana daerah dengan sendiri mengurus seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah terus mengupayakan untuk pendapatan asli di daerah tersebut, mewujudkan kemandirian desa, ini dapat diupayakan dengan cara desa tersebut dapat mengelola dengan lebih baik dana yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada desa tersebut.

Desa dituntut untuk dapat mengelola pengeluaran dana yang diberikan oleh pemerintah daerah, kemandirian desa di sini bisa dilakukan dengan upaya pembangunan yang merupakan faktor utama penilaian akan kemandirian desa tersebut. Kemandirian desa tidak akan berjalan jika tidak ada partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Kemandirian suatu desa dapat terlaksana bila mendapat dukungan dari masyarakat.

Menurut perkembangannya desa terbagi tiga yaitu desa swadaya, desa swakarsa dan desa swasembada. Desa yang swadaya memiliki potensi tertentu tetapi tidak dikelola dengan sebaik-baiknya dengan ciri-ciri : daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, bersifat tertutup, masyarakat memegang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat kurang, hubungan antarmanusia sangat erat, pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga. Sedangkan potensi masyarakat swakarsa adalah peralihan transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada.

Ciri-ciri desa swakarya adalah : kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh, sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi, desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian, telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas-prasarana lain dan jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar. Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan serta mengembangkan sumberdaya alam beserta potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan secara regional. Ciri-ciri desa swasembada yaitu kebanyakan berlokasi di ibu kota kecamatan, tingkat kepadatan penduduk tergolong tinggi, tidak terikat dengan adat istiadat, telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain, partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.

Potensi desa dibagi menjadi dua macam yaitu potensi fisik yang meliputi; tanah air, iklim dan cuaca, flora dan fauna, dan potensi non fisik, meliputi; masyarakat desa, lembaga-lembaga sosial desa dan aparatur desa, bila potensi desa dimanfaatkan dengan efisien maka desa akan berkembang serta desa akan memiliki fungsi secara maksimal bahkan daerah lain dapat bekerjasama satu dengan yang lainnya. Fungsi desa adalah sebagai pemasok kebutuhan bagi kota, merupakan sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan, dan merupakan mitra bagi pembangunan perkotaan, desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah kesatuan negara.

Indikator yang dapat dikaitkan dengan keberhasilan dari suatu desa adalah :

- 1) **Kebebasan mobilitas.** Kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar,

fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.

- 2) **Kemampuan membeli komoditas kecil.** Kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari beras, minyak goreng, bumbu, kebutuhan dirinya. Individu dianggap mampu dalam melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri dan tanpa meminta ijin orang lain termasuk pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang dengan menggunakan uangnya sendiri.
- 3) **Kemampuan untuk membeli komoditas dalam jumlah yang besar.** Kemampuan masyarakat atau individu untuk membeli barang-barang bersifat sekunder atau tersier. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin dari orang lain, terlebih jika ia dapat membeli dengan uangnya sendiri.
- 4) **Terlibat dalam membuat keputusan-keputusan rumah tangga.** Mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama (suami/istri) mengenai keputusan keluarga.
- 5) **Kesadaran hukum dan politik.** Mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa atau kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- 6) **Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.** Memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut

secara sendiri atau terpisah dari pasangannya dan ini merupakan suatu prestise tinggi bagi masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya

B. Masyarakat Desa

Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama saling berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontiniu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya. Unsur-unsur suatu masyarakat (a) harus ada perkumpulan manusia dan harus banyak (b) telah bertempat tinggal dalam waktu lama di suatu daerah tertentu, dengan adanya aturan serta undang-undang yang mengatur masyarakat untuk menuju kepentingan dalam mencapai tujuan bersama.

Faktor-faktor yang mendorong masyarakat secara individu untuk hidup antara lain (a) Hasrat sosial, adalah merupakan niat yang ada selalu pada setiap individu untuk menghubungkan dirinya dengan orang lain atau kelompok lainnya. (b) Hasrat untuk mempertahankan diri, adalah hasrat untuk mempertahankan diri dari berbagai pengaruh luar yang mungkin datang kepadanya, sehingga individu tersebut. Faktor-faktor yang mendorong manusia untuk hidup bermasyarakat perlu bergabung dengan individu lain atau kelompok. (c) Hasrat berjuang, hasrat ini dapat kita lihat pada adanya persaingan, keinginan membantah pendapat orang lain. Sehingga mereka mengadakan persatuan

untuk mencapai tujuan, yaitu tujuan bersama. (d) Hasrat harga diri, rasa harga diri merupakan hasrat pada seseorang untuk menganggap atau bertindak atas dirinya lebih tinggi dari pada orang lain, karena mereka ingin mendapat penghargaan yang selayaknya. (e) Hasrat meniru, adalah hasrat untuk menyatakan secara diam-diam atau terang-terangan sebagian dari salah satu gejala atau tindakan. (f) Hasrat bergaul, adanya hasrat untuk bergabung dengan orang-orang tertentu dalam sekelompok masyarakat di dalam masyarakat itu sendiri. (g) Hasrat untuk mendapatkan kebebasan. Hasrat ini tampak jelas pada tindakan-tindakan manusia bila mendapat kekangan-kekangan atau pembatasan-pembatasan. (h) Hasrat untuk memberitahukan. Hasrat dalam menyampaikan perasaan-perasaan kepada orang lain bisa disampaikan dengan bahasa isyarat (i) Hasrat simpati, kesanggupan secara langsung turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain

Masyarakat merupakan gabungan dari beberapa individu-individu, oleh karena itu setiap individu harus mampu menjadi masyarakat modern, dalam arti masyarakat tanggap akan perubahan zaman, untuk itu masyarakat harus mampu menguasai IPTEK yang semakin hari semakin maju dan semakin berkembang pesat, untuk proses perubahan masyarakat dan kebudayaan dalam seluruh aspeknya, dari sistem tradisional menuju ke sistem yang modern.

Faktor-faktor yang mempengaruhinya karakter masyarakat antara lain perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, perkembangan industri, perkembangan ekonomi, saat ini gejala sosial yang dijumpai di seluruh dunia dan tidak terbatas pada negara-negara berkembang saja, perubahan sosial dalam pergaulan hidup manusia dan akibat-akibatnya terhadap

pergaulan hidup manusia itu sendiri. Perubahan tersebut telah menjadi fakta kehidupan manusia sejak dahulu kala, serta merupakan reaksi atas rangsangan dari luar, perubahan tersebut dapat menimbulkan efek yang positif dan negatif.

Perubahan kemajuan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi serta penggunaannya oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari telah mengakibatkan serta pengaruhnya terhadap sosial politik, ekonomi, tetapi juga pada psikis dan susila terhadap masyarakat. Masyarakat memerlukan penyesuaian dan penguasaan anggota dalam pergaulan hidup, terhadap keadaan yang baru. Terjadinya proses perubahan sosial budaya dalam masyarakat dan dikehendaki oleh masyarakat dinamakan modernisasi. Proses ini pada intinya berarti meningkatkan kemampuan dari masyarakat desa yang bersangkutan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang mencakup kebutuhan akan sandang, keselamatan terhadap harta benda dan jiwa, kesempatan yang wajar untuk dihargai. Kesempatan dalam mengembangkan potensi serta kemampuan dan terjadi transformasi dari kehidupan tradisional baik dalam teknologi serta organisasi sosial menuju ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang menandai negara-negara yang stabil. Modernisasi juga merupakan bentuk sari perubahan sosial biasanya merupakan perubahan sosial yang terarah yang didasar pada suatu perencanaan.

Besarnya kewenangan desa dalam mengelola seluruh sendi kehidupannya memerlukan proses adaptasi, terutama bagi masyarakatnya. Desa masa depan adalah desa yang masyarakatnya partisipatif, mampu menumbuhkan dan mengembangkan nilai ekonomi, sosial, dan budaya. Maka dibutuhkan masyarakat desa yang sadar pada peran dan tanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan desa. Desa harus berdaya bersama

seluruh elemen yang ada di dalamnya, melalui penyelenggaraan kewenangan dasar desa yaitu hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul dan asas kewenangan lokal berskala desa.

Keberhasilan masyarakat desa dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan akses kesejahteraan, dan kemampuan kultur serta politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: kekuasaan di dalam, kekuasaan untuk, kekuasaan atas dan dengan kekuasaan.

Terwujudnya masyarakat desa yang peduli, tanggap dan mampu: (a) mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri, sehingga derajat kesehatannya meningkat, (b) mengembangkan kebijakan pengembangan desa dan kelurahan, (c) meningkatkan komitmen dan kerjasama semua perangkat desa dan organisasi kemasyarakatan untuk pengembangan desa harus aktif, (d) meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar di desa atau kelurahan, (e) melaksanakan survailans berbasis masyarakat penanggulangan bencana dan kedaruratan kesehatan, serta penyehatan lingkungan, (f) meningkatkan ketersediaan sumberdaya manusia, dana, maupun sumberdaya lain, yang berasal dari pemerintah desa, masyarakat dan swasta maupun dunia usaha.

Ciri-ciri masyarakat pedesaan dari sisi kehidupan keagamaan di pedesaan lebih kuat bila dibandingkan dengan perkotaan. Ini terjadi karena ketatnya kontrol sosial oleh sesama anggota masyarakat desa. Warga penduduk desa cenderung saling tolong menolong dan gotong royong, hal ini dikarenakan adanya rasa kebersamaan yang tinggi. Hal tersebut berkontribusi terhadap

tingginya tingkat ketergantungan masyarakat di desa terutama bagi penduduk berusia lanjut. Pembagian kerja antar penduduk di desa cenderung membaur dan tidak memiliki batasan yang cukup jelas. Hal ini dikarenakan rasa kebersamaan dan gotong royong yang tinggi pada masyarakat desa. Penduduk desa cenderung mengerjakan pekerjaan yang sama seperti anggota keluarga terdahulu. Kreativitas dan inovasi cenderung belum diimplementasikan penduduk desa tidak mencari tahu informasi terkini perihal perkembangan zaman dan teknologi. Interaksi yang lebih banyak terjadi berdasarkan pada faktor kepentingan bersama daripada faktor kepentingan pribadi. Pembagian waktu yang lebih teliti dan sangat penting, untuk dapat mengejar kebutuhan individu.

Perubahan-perubahan sosial masyarakat desa yang cenderung terjadi secara perlahan-lahan, tergantung pada keterbukaan masyarakat desa dalam menerima pengaruh yang cukup berbeda dari adat istiadat setempat. Dalam pemberdayaan desa dapat menggunakan pendekatan partisipatif dengan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan serta memanfaatkan sumberdaya dan kearifan lokal yang telah dimiliki oleh masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa fokus untuk membentuk desa sebagai masyarakat pemerintahan yang utuh, demokratis dan kuat antara pemerintah desa dan masyarakat, membangun kepemimpinan desa yang maju, kuat dan merakyat melalui kaderisasi mewujudkan hak serta kewajiban warga desa dalam pemerintahan desa terutama dalam pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia maupun lingkungan, memastikan kebijakan. Diharapkan program pembangunan pedesaan berpihak kepada

warga miskin, dan melakukan pendampingan masyarakat desa secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan utama, potensi yang ada di wilayah serta menjaga kearifan lokal.

C. Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan

Masyarakat sekitar hutan merasa terbebas dari tekanan yang sebelumnya menghimpit mereka. Mereka merasa tidak ada lagi pihak yang menghalangi untuk memanfaatkan hutan. Apabila pemanfaatan ini tidak dilakukan dengan mengedepankan asas kelestarian hutan maka kerusakan hutan yang sebelumnya dilakukan oleh perusahaan akan berlanjut, dengan pelaku yaitu masyarakat. Hal ini mungkin dapat dipahami karena sebagai akibat pola memarjinalkan yang sebelumnya dilakukan oleh perusahaan pemegang HPH, masyarakat sekitar hutan tersebut memiliki kemampuan yang lemah dalam pengelolaan hutan.

Pentingnya eksistensi masyarakat di sekitar kawasan hutan dalam pengelolaan hutan agar tetap lestari dan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan seharusnya menjadi ujung tombak dalam menjaga kelestarian hutan. Perilaku masyarakat dalam berinteraksi dengan hutan dapat diarahkan pada terciptanya hutan lestari. Oleh karena itu, berbagai program pembangunan kehutanan diluncurkan untuk mengedepankan pendekatan manajemen berbasis sumberdaya yang juga berbasis pembangunan hutan berbasis masyarakat.

Paradigma ini merupakan model pembangunan yang berpusat pada rakyat atau masyarakat sekitar hutan. Dengan model pembangunan ini masyarakat dapat diajak berpartisipasi dalam pengelolaan hutan. Model pengembangan desa yaitu dengan mengajak masyarakat di sekitar kawasan hutan agar ikut berpartisipasi dalam pengelolaan hutan dengan mengedepankan

prakarsa dan kekhasan masyarakat. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan sangat diperlukan agar aspek kelestarian hutan tetap terjaga namun kesejahteraan masyarakat tercapai. Namun karena lemahnya kapasitas masyarakat sekitar hutan menyebabkan mereka belum mampu secara optimal berperan serta dalam pengelolaan hutan, oleh karena itu pemerintah dan pihak lain yang peduli akan kondisi masyarakat sekitar hutan yang telah melakukan upaya pemberdayaan.

Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok, bekerjasama cukup lama sehingga dapat mengatur diri sendiri dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang berada dan bertempat tinggal atau bermukim di dalam dan sekitar hutan, baik berupa kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari beberapa keluarga atau yang telah membentuk suku baru, dusun ataupun desa di mana ada interaksi yang cukup kuat antara kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dengan lingkungan hutan

Masyarakat pedesaan di sekitar hutan adalah masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan, kesejahteraan, inisiasi dan daya kreasi yang relatif rendah dan sikap fatalitas menjadikan masyarakat selalu tersubordinasikan oleh sistem, hal ini menjadi sulit untuk berdaya.

D. Masyarakat sebagai Potensi

Untuk bidang peningkatan aksesibilitas, harus diarahkan untuk menyediakan akses terhadap sumberdaya, akses terhadap teknologi dan akses terhadap pembiayaan serta pemanfaatan potensi lokal, pemberdayaan masyarakat harus mampu menyediakan seperangkat teknologi tepat guna sesuai potensi lokal, penyediaan pasar bagi terciptanya aktifitas ekonomi masyarakat serta fasilitas kelompok pengelola prasarana. Untuk melaksanakan semua kebijakan pemberdayaan masyarakat tersebut, faktor utama yang harus dilaksanakan yakni melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui pengkajian dan pengembangan dengan tetap menjunjung tinggi pendekatan operasional sesuai konsep pembangunan daerah.

Masyarakat menempati posisi utama yang memulai, mengelola dan menikmati pembangunan. Pemerintah adalah fasilitator dan membuka ruang yang kondusif bagi tumbuhnya prakarsa, partisipasi dan institusi lokal. Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat.

Pemberdayaan memang sebuah proses, akan tetapi dari proses tersebut dapat dilihat dengan indikator-indikator yang menyertai proses pemberdayaan menuju sebuah keberhasilan. Untuk mengetahui pencapaian tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang atau komunitas berdaya atau tidak. Dengan cara ini kita dapat melihat ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan.

Pemberdayaan masyarakat desa dapat dipahami dengan beberapa cara pandang:

- 1) Pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik kepada masyarakat tentu merupakan tugas yang diberikan pemerintah. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas dalam mengembangkan potensi dan kreasi dalam mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik diranah negara serta masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- 2) Titik pijak pemberdayaan adalah kekuasaan dalam ketidakberdayaan masyarakat. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini berasumsi bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tidak berubah atau tidak dapat diubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas dan kekuasaan tidak vakum atau terisolasi, kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah.
- 3) Pemberdayaan terbentang dari proses sampai visi ideal. Pada saat proses berjalan masyarakat sebagai subyek melakukan tindakan atau gerakan secara kolektif serta mengembangkan

potensi wilayah dengan memperkuat posisi tawar dan meraih kedaulatan untuk kepentingan bersama. Idealnya proses tersebut hendak mencapai suatu kondisi dimana masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian, akses yang banyak serta kontrol terhadap lingkungan, komunitas, sumberdaya manusia dan lingkungan serta relasi sosial politik

- 4) Untuk mencapai tujuan visi yang ideal maka harus tumbuh dari bawah dan dari dalam masyarakat itu sendiri. Proses dalam mencapai tujuan utama harus berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Namun, masalahnya, dalam kondisi struktural yang timpang masyarakat sulit sekali membangun kekuatan dari dalam dan dari bawah, sehingga membutuhkan intervensi dari luar.
- 5) Pemberdayaan terbentang dari level psikologis personal sampai ke level struktural masyarakat secara kolektif. Sasaran pemberdayaan adalah masyarakat, yang di dalamnya mewadahi warga secara individual maupun komunitas secara kolektif. Pemberdayaan adalah upaya membangkitkan kekuatan dan potensi masyarakat yang bertumpu pada komunitas lokal melalui pendekatan partisipatif dan belajar bersama. Dari sisi strategi, pendekatan dan proses, pemberdayaan merupakan gerakan dan pendekatan berbasis masyarakat lokal maupun bertumpu pada kapasitas lokal, yang notabene bisa dimasukkan ke dalam kerangka pembaharuan menuju kemandirian masyarakat

Kebijakan pemberdayaan masyarakat harus diarahkan untuk menanggulangi masalah bencana alam, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bantuan kepada masyarakat miskin, termasuk di dalamnya fasilitas pembentukan dan

pengembangan kawasan pedesaan, kebijakan pemberdayaan masyarakat harus menjawab masalah sumberdaya aparatur pemerintahan desa, masalah kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan infrastruktur pendukung dengan memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumberdaya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas.

Pemberdayaan desa tersebut muncul karena adanya situasi kondisi sosial masyarakat desa yang rendah dan mengakibatkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dan memiliki informasi yang sangat minim bahkan tidak tahu. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah. Dengan melibatkan masyarakat sejak awal dalam kegiatan memungkinkan masyarakat memiliki kesempatan dalam belajar yang lebih banyak. Pada awal kegiatan selalu diperlukan pendamping karena akan memberikan contoh secara langsung. Pada tahap ini masyarakat masih lebih banyak belajar lagi namun pada tahap-tahap selanjutnya pendamping sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencoba melakukannya sendiri sehingga masyarakat mampu. Jika ini terjadi kemungkinan di kemudian hari pada saat pendamping akan meninggalkan masyarakat maka masyarakat sudah mampu melakukannya secara mandiri. Pemberdayaan desa perlu dengan memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta mengembangkan kontrol publik dan implementasi dari keputusan-keputusan bersifat publik.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat desa perlu ditekankan adanya keutamaan politik. Politik dalam rangka

pemberdayaan masyarakat ini merupakan transformasi politik ke dalam tindakan nyata, khususnya demokrasi hadir dalam hidup sehari-hari. Melalui penerapan demokrasi musyawarah mufakat setiap warga desa berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai konteks hidupnya masing-masing. Dengan demikian, demokrasi memberi ruang bagi anggota masyarakat dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ditingkat pemerintah desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi masyarakat dengan mendayagunakan kemampuan masyarakat desa terutama pembangunan desa, menyusun perencanaan dalam pembangunan serta meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat desa.

Pembangunan selama ini dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai obyek pembangunan yang menerima semua program dari pemerintah. Paradigma pembangunan lama berorientasi pada negara dan berubah menjadi paradigma baru lebih fokus pada masyarakat dan institusi lokal. Modal dalam paradigma pembangunan lama harus dipupuk terus meski harus ditopang dengan pengelolaan politik secara otoritarian dan sentralistik, sebaliknya pemberdayaan adalah pembangunan yang dibuat secara demokratis, desentralistik dan partisipatoris. Dasar pemikiran pemberdayaan masyarakat adalah memajukan kemampuan masyarakat desa untuk mengelola secara mandiri dalam urusan komunitasnya. Dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, Undang-Undang Desa menempatkan kesepakatan bersama seluruh warga desa sebagai pedoman bagi

Pemerintah Desa dalam mengelola kewenangannya untuk mengurus dan mengatur Desa.

Pemberdayaan masyarakat desa sangat perlu dalam pembangunan, di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat desa dapat terjadi dan berhasil bila masyarakat tersebut berpartisipasi. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa dan upaya merubah pola perilaku masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian di bidang perlindungan sosial dan ekonomi

Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai pemberdayaan masyarakat apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Di sini subjek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat atau objek saja. Pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan, seimbang dan lestari, pembangunan desa yang berusaha memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan desa dalam pemenuhan kebutuhannya di masa depan.

2. Masyarakat Desa sebagai Pelaku Perubahan

Kondisi sumberdaya hutan terus mengalami penurunan karena mengalami degradasi secara terus menerus. Di sisi lain jutaan penduduk secara langsung mengandalkan kehidupannya

pada sumberdaya hutan. Dengan kondisi penduduk yang berada di sekitar hutan dalam kemiskinan serta membutuhkan lahan sebagai sumber kehidupannya, mendorong niatnya yang semakin kuat dalam pengelolaan hutan serta melibatkan masyarakat atau *social forestry*. Paradigma baru pembangunan kehutanan mengarah kepada orientasi pemberdayaan masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai subyek atau pelaku utama. Sebagai pelaku utama dalam mengelola sumberdaya hutan, maka tema pemberdayaan menjadi faktor yang sangat penting. Terlebih lagi dalam sistem pengelolaan hutan secara bersama antara Perhutani dengan masyarakat. Salah satu pemberdayaan terhadap masyarakat yang efektif yaitu melalui kelompok, karena lebih luas jangkauannya dan sesuai dengan budaya masyarakat pedesaan yang komunal.

Pelaku perubahan dalam masyarakat adalah seorang agen perubahan. Pelaku pemberdayaan masyarakat adalah tokoh masyarakat dan kepala desa yang bertindak sebagai penghubung dan penggerak masyarakat. Tindakan agen perubahan yang dilakukan oleh masyarakat haruslah sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat binaanya. Kesesuaian perilaku dengan tradisi masyarakat sangat mempengaruhi peran dan tugasnya dalam menyebarkan sebuah difusi inovasi.

Kecenderungan terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat merupakan gejala hal yang wajar yang muncul dari pergaulan hidup manusia, mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti misalnya dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, atau kebudayaan yang bersifat periodik dan nonperiodik. Secara garis besar, bahwa perubahan merupakan lingkaran kejadian-kejadian segenap usaha untuk mengemukakan bahwa ada suatu kecenderungan yang tertentu dan tetap dalam

perubahan-perubahan sosial, tidak akan berhasil baik. Perubahan-perubahan memang ada dan yang paling penting adalah bahwa lingkaran terjadinya gejala-gejala sosial harus dipelajari, karena dengan jalan itulah baru akan dapat diperoleh suatu generalisasi.

Di dalam sebuah proses pemberdayaan memerlukan pelaku perubahan yang berperan sebagai animator sosial agar proses pemberdayaan berjalan terus. Pelaku perubahan mempunyai peran sebagai komunitas pekerja. Seorang komunitas pekerja harus memiliki keterampilan sebagai berikut:

- 1) **Keterampilan fasilitatif.** Seorang pelaku perubahan harus mempunyai peran sebagai animator sosial, mediasi dan negosiasi, pemberi dukungan, membentuk konsensus, memfasilitasi kelompok, memanfaatkan sumberdaya dan keterampilan, dan mengorganisir.
- 2) **Keterampilan edukasional.** Seorang pelaku perubahan juga harus mempunyai peran untuk membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, mengkonfrontasikan, dan melatih.
- 3) **Keterampilan perwakilan.** Pada posisi ini seorang pelaku perubahan diharapkan mempunyai peran dapat mencari sumberdaya, advokasi, memanfaatkan media, membuat hubungan masyarakat, mengembangkan jaringan, dan membagi pengetahuan kepada masyarakat.
- 4) **Keterampilan teknis.** Adapun keterampilan teknis yang meliputi keterampilan untuk melakukan riset, menggunakan komputer, melakukan presentasi secara tertulis maupun verbal, serta kemampuan untuk mengontrol dan mengelola keuangan.

Seorang komunitas pekerja diharapkan memiliki pengetahuan dan terampil dalam mengisi berbagai peran. Peran tertentu yang dipilih seharusnya ditentukan oleh apa yang akan menjadi paling efektif, peran-peran tersebut antara lain:

- 1) Pemungkin : merupakan peran untuk membantu individu atau kelompok untuk mengartikulasi atau menyatakan kebutuhan-kebutuhan mereka, menjelaskan dan mengidentifikasi masalah mereka, mencari strategi pemecahan masalah, serta memilih dan menerapkan strategi guna mengembangkan kapasitas mereka dalam menangani masalah secara efektif.
- 2) Penghubung: merupakan peran yang menghubungkan individu-individu dan kelompok yang perlu bantuan dan yang tidak tahu dimana bantuan tersebut bisa didapat dari pelayanan masyarakat.
- 3) Pembela : merupakan peran memberikan kepemimpinan dalam mengumpulkan informasi, mengargumentasikan kebenaran, kebutuhan, dan permintaan klien. Hal tersebut dilakukan apabila seorang klien atau kelompok sedang membutuhkan bantuan hukum yang sering dilaksanakan oleh advokasi. Advokasi sebagai aktifitas yang menolong klien untuk mencapai pelayanan ketika terjadi penolakan dari suatu lembaga.
- 4) Memberdayakan masyarakat dengan tujuan untuk membantu individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan pribadi mereka, interpersonal, sosial ekonomi, dan kekuatan politik.

- 5) Aktivistis : komunitas yang memiliki peran untuk melakukan perubahan institusional, mereka peduli dengan ketidakadilan, ketidakmerataan, kemiskinan sosial. Taktik yang mereka gunakan berupa konflik, konfrontasi dan negosiasi.
- 6) Mediator : merupakan peran melakukan intervensi jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Hal ini untuk membantu mereka dalam usaha mencapai kompromi, merekonsiliasi perbedaan yang ada, dan mencapai kesepakatan bersama.

BAB IV

TAHAPAN DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAWASAN HUTAN

1. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam proses pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Tanpa mengecilkkan arti dan peranan salah satu faktor, sebenarnya kedua faktor tersebut saling berkontribusi dan mempengaruhi secara sinergis dan dinamis. Faktor internal sangat penting sebagai salah satu wujud mengorganisir diri dari masyarakat namun kita juga perlu memberikan perhatian pada faktor eksternalnya.

Proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multidisplin. Tim pendamping dalam pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu faktor eksternal bagi masyarakat. Peran tim pada tahap awal proses sangat aktif namun seiring berjalannya program mulai menurun secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatan menuju masyarakat mandiri. Dalam pelaksanaan operasional di lapangan inisiatif tim pemberdayaan masyarakat akan berangsur-angsur dikurangi dan akhirnya berhenti.

Peran tim PM sebagai fasilitator akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat. Waktu pemunduran tim pemberdayaan masyarakat tergantung kesepakatan bersama yang telah ditetapkan sejak awal program antara tim pemberdayaan masyarakat dan warga masyarakat. Berdasar beberapa pengalaman dilaporkan bahwa pemunduran tim pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan minimal 3 tahun setelah proses dimulai dengan tahap sosialisasi. Walaupun saatnya tim sudah mundur atau selesai tugasnya anggota tetap berperan dan tim bertugas sebagai penasehat atau konsultan apabila diperlukan oleh masyarakat. Tahapan-tahapan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Secara rinci masing-masing tahap tersebut adalah sebagai berikut:

Tahap 1. Seleksi Wilayah

Pada saat seleksi desa atau dusun dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak lain serta masyarakat. Penetapan kriteria penting agar tujuan lembaga dalam pemberdayaan masyarakat akan tercapai serta pemilihan wilayah atau lokasi dilakukan sebaik mungkin. Pengenalan wilayah kerja pemberdayaan masyarakat merupakan cara untuk lebih tahu dan mengenal suatu tempat masyarakat yang akan mampu meng-optimalisasikan masyarakat yang telah mampu sehingga masyarakat yang lebih mampu dan lebih baik lagi serta tercipta masyarakat yang sejahtera. Pemberdayaan berpusat pada rakyat sehingga rakyat berperan aktif dalam proses pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerahnya dan membantu masyarakat untuk terbebas dari keterbelakangan atau

kemiskinan. Setiap desa memiliki potensi, kondisi daerah dan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. Untuk itu dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa setempat harus lebih banyak terlibat mengetahui potensi dan kondisi desanya sedangkan pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator yang mendukung program pemberdayaan.

Pengenalan wilayah kerja dalam pemberdayaan merupakan salah satu hal penting karena dengan mengenal dahulu wilayah kerja untuk mengembangkan masyarakat bisa membuat masyarakat tersebut menjadi masyarakat yang lebih sejahtera. Beberapa pendekatan dalam masyarakat antara lain (1) Pendekatan berdasarkan kesamaan masalah : dalam hal ini masyarakat didekati menurut kesamaan masalah yang dihadapi, misalnya masalah yang dihadapi beternak lebah. Pendekatan ini memiliki kekuatan karena mempermudah dalam pendampingan. Kelemahannya adalah sulit melakukan pendampingan secara kelompok karena lokasi tempat tinggal yang berjauhan. (2) Pendekatan berdasarkan tempat berkumpulnya : masyarakat didekati berdasarkan tempat mereka berkumpul sehari-harinya, misalnya pedagang kayu pakis. Pendekatan ini menguntungkan dari segi pengelompokan karena sudah berkumpul di suatu lokasi tertentu. (3) Pendekatan berdasarkan tempat tinggal : pembinaan dilakukan dilokasi pemukiman. Pendekatan ini mempunyai kelebihan terutama mudah diketahui latar belakang peserta pemberdayaan.

Tahap 2. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan ini untuk menciptakan komunikasi serta dialog dengan masyarakat. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat membantu untuk meningkatkan pengertian masyarakat dan pihak

terkait tentang program. Manfaat dari sosialisasi pemberdayaan masyarakat dilakukan adalah untuk menciptakan komunikasi serta dialog dengan masyarakat dan untuk meningkatkan pengertian serta kesadaran masyarakat pada pihak terkait tentang program yang diberikan oleh tim. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk menciptakan komunikasi serta dialog dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat dan pihak terkait tentang program. Proses sosialisasi sangat menentukan ketertarikan masyarakat untuk berperan dan terlibat di dalam program.

Tahapan metode pada saat proses sosialisasi adalah melaksanakan pertemuan formal aparat desa dengan masyarakat, tokoh masyarakat untuk menyepakati wilayah kerja, pertemuan informal dengan melakukan kunjungan ke rumah-rumah dan diskusi bersama. Kelompok, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat sosial, agama, lapangan. Hal-hal yang perlu disosialisasikan misalnya: penjelasan tujuan, manfaat, sasaran pemberdayaan masyarakat, prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat termasuk prinsip non-fisik, penjelasan kelompok sasaran pria, wanita dan pemuda, umpan balik masyarakat terhadap semua aspek. Materi dan media yang dapat dimanfaatkan dalam sosialisasi diantaranya: brosur, film, video, poster dan buku.

Tahap 3. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Maksud dilakukan pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut:

- 1) Mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan, potensinya serta peluang.

Tahap ini sering dikenal dengan kajian keadaan pedesaan partisipatif atau sering dikenal dengan *Participatory Rural Appraisal* (PRA). PRA adalah suatu pendekatan yang memanfaatkan macam-macam teknik visualisasi untuk proses analisa keadaan. Kegiatan ini dilaksanakan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa kondisinya baik potensi yang dimiliki maupun permasalahan yang ada. Pada tahap ini sangat diharapkan karena diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek kelembagaan.

Tahapan dalam proses kajian meliputi: (a) persiapan desa dan masyarakat menentukan teknis pertemuan, (b) persiapan dalam tim kesepakatan teknik PRA, alat dan bahan, pembagian peran dan tanggungjawab, (c) pelaksanaan kajian keadaan yaitu kegiatan PRA dan (d) pembahasan hasil dan penyusunan rencana tindak lanjut.

- 2) Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian.

Setelah teridentifikasi seluruh potensi dan permasalahan yang ada pada masyarakat, langkah selanjutnya adalah memfokuskan kegiatan kepada masyarakat yang benar-benar tertarik untuk melakukan kegiatan secara bersama. Pembentukan kelompok berdasar kemauan masyarakat dan dapat menggunakan kelompok-kelompok yang sudah ada sebelumnya dilengkapi dengan kepengurusan dan aturan. Kelompok masyarakat yang difasilitasi oleh fasilitator menyusun rencana kelompok berupa rencana kegiatan yang konkrit serta realistis untuk dilaksanakan.

Tahapan penyusunan dan pelaksanaan rencana kelompok:
(a) Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah hasil PRA lebih rinci (b) Identifikasi alternatif pemecahan masalah terbaik (c) Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah (d) Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya.

3) Menerapkan rencana kegiatan kelompok.

Rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitas dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan.

4) Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus (*monitoring*).

Monitoring dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar proses pemberdayaan masyarakat berjalan dengan tujuannya. *Monitoring* dan evaluasi adalah suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik prosesnya, maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan.

Tahap 4. Pemandirian Masyarakat

Mengembangkan kemampuan masyarakat, agar merubah perilaku masyarakat yang tidak peduli menjadi peduli serta mengorganisir diri masyarakat agar lebih mampu mencapai kesejahteraan. Kemampuan masyarakat dikembangkan untuk berusaha, mencari informasi, mengelola kegiatan sesuai dengan arah maupun tujuan kelompok. Arah pendampingan kelompok adalah mempersiapkan diri masyarakat agar benar-benar mampu

dalam mengelola kegiatannya kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengorganisasian masyarakat sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan, masyarakat dapat membentuk panitia kerja, melakukan pembagian tugas, saling mengawasi, merencanakan kegiatan dan berpegang pada prinsip pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, arah pendampingan kelompok adalah untuk mempersiapkan diri masyarakat agar benar-benar mampu dalam mengelola kegiatannya.

Tahap 5. Evaluasi.

Evaluasi merupakan proses pengawasan dari masyarakat, serta petugas program. Evaluasi merupakan proses pengawasan dari masyarakat, serta petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Adapun yang dievaluasi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah :

- a) **Pencapaian hasil.** Pencapaian hasil yang mengacu pada tujuan program yaitu merefleksikan sasaran pengurangan pengentasan kemiskinan. Output dan laporan hasil sudah

mencerminkan keadaan sebenarnya di masyarakat dalam meningkatkan akses infrastruktur, efisiensi waktu, penyerapan tenaga kerja.

- b) **Evaluasi program dan pengawasan mutu.** Pada program monitoring serta evaluasi dilakukan secara reguler sebagai bagian dari pengawasan mutu. Jenis valuasi yang dilakukan dalam proses, metodologi dan dampak serta hasilnya cukup dipercaya.
- c) **Seleksi lokasi dan sasaran kemiskinan.** Proses seleksi lokasi program telah memprioritaskan pada wilayah miskin. Pemilihan penerima manfaat program telah mendasari pada kelompok warga paling miskin.
- d) **Organisasi masyarakat.** Proses pembentukan kelompok dan pemilihan organisasi masyarakat dalam pendampingan yang dilakukan agar program tersebut berjalan serta berkelanjutan. Jenis program pengembangan kapasitas untuk memperkuat keberadaan organisasi masyarakat.
- e) **Efektivitas biaya.** Rincian komponen biaya program bantuan kemasyarakat dalam pengembangan kapasitas, asistensi teknis dan administrasi, anggaran yang cukup rasional dari sisi biaya per unit maupun keseluruhan. Untuk itu perlu dievaluasi biaya yang efektivitas ditingkat lapangan.
- f) **Pengembangan kualitas SDM.** Jenis kegiatan pengembangan kualitas yang diberikan di tingkat lokal, pemerintah daerah, fasilitator pendamping dan organisasi masyarakat.
- g) **Kepuasan terhadap program.** Transparansi informasi program merupakan tingkat kepuasan masyarakat dan stakeholder terhadap pelaksanaan dan hasil program.

h) Keberlanjutan program. Kegiatan oleh dan kepada masyarakat dalam mendorong penerima manfaat untuk melanjutkan program

2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kawasan Hutan

Kondisi sumberdaya hutan terus mengalami penurunan karena mengalami degradasi secara terus menerus. Di sisi lain jutaan penduduk secara langsung mengandalkan kehidupannya pada sumberdaya hutan. Kondisi penduduk di sekitar hutan yang dalam kemiskinan dan membutuhkan lahan sebagai sumber kehidupannya, mendorong semakin menguatnya pendekatan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat. Sebagai pelaku utama dalam mengelola sumberdaya hutan, maka tema pemberdayaan menjadi faktor yang sangat penting. Terlebih lagi dalam sistem pengelolaan hutan secara bersama dengan masyarakat.

A. Pengembangan Ekonomi

1. Kondisi Perekonomian Desa Saat Ini

Kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat tampak perbedaan pendapatan dan kesejahteraan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Ada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang sangat tinggi, sementara itu terdapat pada kelompok masyarakat yang pendapatan dan kesejahteraannya sangat rendah atau dapat dikatakan miskin. Kelompok masyarakat yang pendapatan dan kesejahteraannya sangat rendah ini dialami oleh masyarakat lapisan bawah, yakni golongan ekonomi lemah, para pengangguran, para petani kecil, buruh tani yang umumnya berada dalam masyarakat pedesaan.

Ekonomi rakyat pedesaan adalah kehidupan ekonomi yang seadanya dengan mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam setempat yang memiliki ciri-ciri (a) bersifat tradisional, (b) skala usahanya kecil dan (c) subsisten. Karena itu dalam ekonomi rakyat pedesaan produksi diarahkan untuk konsumsi sendiri, kegiatan atau usahanya bersifat sekedar untuk bertahan hidup. Jika terdapat kelebihan hasil produksi atas kebutuhannya sendiri, maka kelebihan tersebut akan dijual ke pasar. Dengan demikian produksi belum ditujukan untuk kepentingan pasar.

Sifat tradisional ekonomi rakyat ditandai dan jenis usahanya melestarikan usaha yang telah dirintis pendahulunya. Bentuk usahanya bersifat perseorangan dan teknologi yang digunakan masih relatif sederhana. Kecilnya skala usaha yang dilakukan disebabkan terbatasnya modal dalam peralatan yang digunakan, akibatnya jumlah dan mutu produk yang dihasilkan juga terbatas. Karena itu, usaha perluasan dan peningkatan produksi menjadi terhambat. Keadaan ini akan berdampak hilangnya kesempatan produsen untuk dapat tambahan permintaan maupun kenaikan harga produk, sehingga keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh tidak dapat diraih. Oleh karena itu, untuk meningkatkan skala usahanya diperlukan tambahan modal dan perbaikan teknologi.

Daerah pedesaan yang perlu adanya pemberdayaan merupakan daerah yang perekonomiannya tertinggal atau terbelakang bila dibandingkan dengan daerah perkotaan. Karena itu, justru di daerah pedesaan akan lebih berkembang pengaruh yang merugikan misalnya, (a) meniru pola konsumsi orang kaya pada hal yang bersangkutan sebenarnya belum mampu, (b) etos kerja rendah, lebih senang bersantai dari pada bekerja keras, (c) lebih mengutamakan prestise dari pada prestasi. Di pihak lain,

daerah pedesaan memerlukan modal yang cukup banyak, yang dapat dicari dengan menggiatkan tabungan, tidak boros serta tidak berkonsumsi melebihi pendapatannya. Untuk meningkatkan taraf hidup diperlukan etos kerja yang tinggi serta mengutamakan prestasi dari pada prestise. Sementara itu, mereka yang memiliki modal tinggi tidak tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah pedesaan, melainkan menanamkan modalnya di daerah perkotaan. Para penduduk desa yang telah lulus perguruan tinggi, tenaga kerja yang memiliki keterampilan keahlian justru pergi dari desa untuk mencari pekerjaan ke kota. Padahal untuk mempercepat pembangunan pedesaan diperlukan modal yang cukup serta tenaga kerja yang terampil, namun modal yang ada tenaga-tenaga kerja yang terampil justru meninggalkan desa dan bertempat tinggal di daerah perkotaan. Akibatnya perkembangan ekonomi pedesaan menjadi terhambat.

2. Upaya Pengembangan Ekonomi Pedesaan

Berdasarkan atas berbagai penyebab keterlambatan perkembangan ekonomi pedesaan perlu diupayakan kebijakan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi pedesaan. Masalah dan upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain :

- a) **Kekurangan dana untuk modal usaha.** Oleh karena itu perlu tersedianya kredit, mengingat rendahnya tabungan yang dapat diwujudkan, berhubung pendapatan yang diperoleh relatif rendah. Dengan tersedianya kredit maka diharapkan dapat meningkatkan produksi, pendapatan dan surplus usaha sehingga memungkinkan terjadinya tabungan dan pembentukan modal.
- b) **Minimnya informasi tentang kredit.** Kredit yang disediakan hendaknya sesuai dengan kebutuhan usaha serta tepat waktu.

Tidak kalah pentingnya, perlunya penyuluhan dan pengarahannya dalam menggunakan kredit, sehingga kredit yang diambil benar-benar digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif.

- c) **Rendahnya kualitas sumberdaya manusia.** Perlu dilakukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk kepentingan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat dilakukan antara lain dengan cara: (1) pendidikan, penyuluhan, penataran dan latihan kewiraswastaan. Dengan pendidikan ini diharapkan akan dapat ditingkatkan pengetahuan, keterampilan, jiwa kewiraswastaan serta etos kerja; (2) sistem magang, latihan. Dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman serta keterampilan; (3) sistem bapak angkat, dimaksudkan untuk memperoleh bimbingan serta mendapatkan kemudahan dalam pengadaan bahan baku maupun pemasaran.
- d) **Inovasi teknologi yang rendah.** Teknologi mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan produktivitas. Dengan adanya perbaikan teknologi maka jumlah modal dan produk dapat ditingkatkan serta memungkinkan diadakan diversifikasi produk. Dengan meningkatnya jumlah dan mutu produk serta dapat memperluas pemasaran yang akhirnya pendapatan yang diterima akan meningkat pula. Mengingat kualitas sumberdaya manusia masyarakat pedesaan pada umumnya masih rendah, maka teknologi yang diterapkan pada kegiatan ekonomi pedesaan bukanlah teknologi tinggi yang rumit ataupun teknologi yang padat modal, melainkan teknologi tepat guna dan padat tenaga kerja.

- e) **Pemasaran dan bahan baku yang tidak lancar.** Kelancaran pemasaran merupakan faktor yang sangat menentukan kesinambungan kegiatan produksi. Kegiatan produksi akan mengalami hambatan apabila tidak didukung oleh kelancaran pemasaran. Produsen akan menderita kerugian apabila produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan. Oleh sebab itu banyak produsen yang bersedia mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk memperlancar pemasaran. Barang-barang yang dihasilkan di pedesaan pada umumnya berupa barang-barang hasil pertanian, peternakan, industri kecil dan kerajinan rakyat. Barang-barang ini pada umumnya belum mempunyai pasar yang luas maupun harga yang mantap. Untuk produk-produk pertanian harga mengalami penurunan pada musim panen sedangkan biaya produksi menunjukkan kenaikan. Demikian juga untuk peternakan, terdapat kecenderungan harga bahan-bahan mengalami kenaikan sedangkan harga produknya tidak menentu. Akibatnya penghasilan yang diterima produsen kurang menguntungkan. Masalah pemasaran sangat dirasakan oleh produsen pertanian, industri kecil dan kerajinan rakyat. Guna mendorong dan mengembangkan sektor ini, perlu adanya bantuan pemasaran. Bantuan pemasaran ini dapat dilakukan dengan cara, antara lain (a) penataan sistem bapak angkat, (b) mendirikan pusat-pusat pemasaran, (c) menyelenggarakan pameran produk, (d) mendirikan atau menetapkan perusahaan pengolah dan pemakai produk yang bersangkutan, (e) meningkatkan kerjasama dengan badan usaha atau koperasi, (f) adanya kebijaksanaan yang berupa aturan atau himbauan untuk menggunakan produk yang bersangkutan dan (g) mencarikan pasar baru termasuk memasarkan ke luar negeri. Selain masalah pemasaran,

kendala yang dihadapi produsen di daerah pedesaan adalah kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Belum adanya koordinasi dalam pengadaan barang bahan-bahan yang diperlukan mengakibatkan harga bahan-bahan menjadi naik serta di lain pihak kontinnuitas penyediaan bahan baku kurang terjamin, oleh sebab itu perlu ada upaya untuk menjamin pengadaan bahan baku secara kontiniu dengan harga yang wajar.

- f) **Pusat-pusat pertumbuhan di pedesaan sangat minim.** Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan di pedesaan guna mengurangi arus mengalirnya modal dan tenaga kerja terampil dan ahli dalam tata kelola desa maka di pedesaan perlu diciptakan pusat pertumbuhan. Dengan cara mendirikan pusat-pusat perdagangan, terminal ataupun perusahaan dapat dipandang sebagai sarana pusat pertumbuhan. Dengan adanya pusat-pusat pertumbuhan tersebut permintaan tenaga kerja dan modal kiranya meningkat, sehingga tenaga kerja dan modal yang ada dapat tertampung di daerah pedesaan yang bersangkutan. Dengan demikian urbanisasi dapat dicegah, ekonomi pedesaan akan terangkat untuk berkembang. Selain itu perlu digalakkan gerakan kembali ke desa guna menciptakan kota kecil. Dengan adanya pusat pertumbuhan diharapkan gerakan kembali ke desa akan berjalan lancar dan di lain pihak dapat menimbulkan pengaruh positif sehingga kegiatan ekonomi pedesaan akan semakin berkembang.

B. Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat Desa

Tujuan pembangunan di bidang sosial budaya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai

dengan meningkatnya kualitas hidup yang layak dan bermartabat serta mampu memberikan perhatian utama pada tercukupinya dalam memenuhi kebutuhan dasar. Sasaran umum yang akan dicapai adalah meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya laju pertumbuhan penduduk, menurunnya angka kelahiran total, menurunnya angka kematian kasar, meningkatnya ketahanan sosial dan budaya, meningkatnya kedudukan dan peranan perempuan, meningkatnya partisipasi aktif pemuda, serta meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, telah dilaksanakan berbagai kebijakan dan program-program pembangunan dibidang sosial dan budaya, yang berbangsa dan bernegara, dan peningkatan kualitas peran dan kemandirian organisasi.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan sosial budaya yang masih rentan, antara lain ditinjau dari disorientasi tata nilai, keterbatasan sikap kritis terhadap nilai budaya, krisis identitas, dan lemahnya kemampuan dalam mengelola keragaman budaya. Sementara itu, globalisasi telah mengakibatkan masuknya arus informasi yang sangat beragam dan nyaris tanpa batas dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap budaya bangsa menjadi semakin rentan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kebijakan pembangunan kebudayaan diarahkan pada upaya mengembangkan dan membina kebudayaan nasional yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, untuk itu perlu pembangunan sosial budaya masyarakat.

Pembangunan sosial budaya masyarakat merupakan suatu proses perubahan sosial yang terencana yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh, dengan menggabungkannya proses pembangunan ekonomi yang dinamis

dengan tujuan pembangunan sosial adalah mengangkat kesejahteraan sosial budaya, sejahtera dari kondisi sosial baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terjadinya sebuah perubahan tidak selalu berjalan dengan lancar, meskipun perubahan tersebut diharapkan dan direncanakan. Adanya faktor yang mendorong masyarakat sehingga mendukung terjadinya perubahan, tetapi juga ada juga faktor penghambat yang membuat perubahan tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan atau yang diharapkan.

1. Faktor yang Mendorong terjadinya Perubahan Sosial Budaya

- a) **Terjadinya kontak atau sentuhan dengan kebudayaan lain.** Dengan bertemunya budaya masyarakat yang berbeda menyebabkan manusia saling berinteraksi serta mampu menghimpun berbagai pertemuan yang dihasilkan, baik yang berasal dari budaya sendiri, budaya asing bahkan menghasilkan budaya yang dipadukan menjadi budaya kreasi baru. Hal ini sangat mendorong terjadinya perubahan dan akan memperkaya kebudayaan yang telah ada
- b) **Sistem pendidikan formal yang maju.** Pendidikan adalah salah satu faktor yang dapat mengukur tingkat kemajuan pada satu kelompok masyarakat. Pendidikan telah membuka pikiran dan membiasakan berpola pikir ilmiah, rasional, dan objektif. Hal ini memberikan kemampuan bagi masyarakat untuk menilai apakah kebudayaan masyarakatnya telah memenuhi perkembangan jaman dan perlu adanya perubahan maupun tidak perlu perubahan.

- c) **Sikap menghargai hasil karya orang dan keinginan untuk maju.** Sebuah hasil karya bisa memotivasi seseorang untuk mengikuti jejak karya. Orang yang berpikiran dan berkeinginan maju senantiasa termotivasi untuk mengembangkan diri.
- d) **Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang.** Penyimpangan sosial sejauh tidak melanggar hukum atau merupakan tindak pidana, dapat merupakan cikal bakal terjadinya perubahan sosial budaya. Untuk itu, toleransi yang didapatkan oleh masyarakat dapat memberikan serta tercipta hal-hal baru yang kreatif dan bermanfaat.
- e) **Sistem terbuka dalam lapisan-lapisan masyarakat.** Sistem terbuka memungkinkan adanya gerak sosial vertikal atau horizontal yang lebih luas kepada anggota masyarakat. Masyarakat sebaiknya tidak perlu lagi memperlakukan status sosial di dalam menjalin hubungan dengan sesama agar lebih akrab dan tidak ada rasa ketersinggungan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini membuka kesempatan kepada para individu untuk dapat mengembangkan kemampuan dirinya.
- f) **Penduduk yang heterogen.** Masyarakat yang heterogen dengan latar belakang budaya, ras dan ideologi yang berbeda akan mudah terjadi pertentangan atau banyaknya pendapat masing-masing yang dapat menimbulkan kegoncangan sosial.
- g) **Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu.** Rasa tidak puas bisa menjadi sebab terjadinya perubahan. Keadaan tersebut merupakan pendorong

terjadinya perubahan-perubahan yang baru dalam masyarakat untuk mencapai keselarasan sosial. Karena adanya ketidakpuasan yang menimbulkan reaksi dalam bentuk perlawanan, pertentangan dengan berbagai gerakan revolusi untuk mengubahnya.

- h) **Orientasi ke masa depan.** Kondisi yang senantiasa berubah merangsang orang mengikuti dan menyesuaikan dengan perubahan. Masyarakat yang memiliki pemikiran dengan orientasi ke masa depan akan membuat masyarakat selalu berpikir positif dan maju serta mendorong terciptanya hal-hal baru yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.
- i) **Nilai bahwa manusia harus selalu berusaha untuk perbaikan hidup.** Usaha merupakan keharusan bagi setiap masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan menggunakan sumberdaya yang sangat terbatas. dengan menggunakan sumberdaya yang terbatas. Usaha-usaha ini merupakan faktor terjadinya perubahan

2. Modernisasi Sebagai Kasus Perubahan Sosial dan Budaya

Modernisasi, menunjukkan suatu proses dari serangkaian upaya untuk menuju atau menciptakan nilai-nilai fisik, material dan sosial yang bersifat atau berkualifikasi universal, rasional, dan fungsional. Lazimnya suka dipertentangkan dengan nilai-nilai tradisi. Modernisasi berasal dari kata modern, modernitas, yang diartikan sebagai nilai-nilai yang keberlakuan dalam aspek ruang, waktu, dan kelompok sosialnya lebih luas atau universal, itulah spesifikasi nilai. Hal yang lajim dipertentangkan dalam konsep modern adalah tradisi yang ada pada masyarakat, yang berarti

barang sesuatu yang diperoleh oleh masyarakat melalui proses pewarisan secara turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Umumnya tradisi meliputi sejumlah norma yang keberlakuannya tergantung pada ruang, waktu, dan kelompok masyarakat tertentu. Artinya masa berlakunya terbatas, tidak bersifat universal yang berlaku bagi nilai-nilai.

a) Kualifikasi nilai

Sebagai contoh atau kasus, seyogianya manusia mengenakan pakaian, ini merupakan atau termasuk kualifikasi nilai. Semua pihak cenderung mengakui dan menganut nilai atau value ini. Spesifikasi norma-norma dan tradisi bila dilihat atas dasar proses modernisasi adalah sebagai berikut (1) ada norma-norma yang bersumber dari tradisi itu, boleh dikatakan sebagai penghambat kemajuan atau proses modernisasi, (2) ada pula sejumlah norma atau tradisi yang memiliki potensi untuk dikembangkan, disempurnakan, dilakukan pencerahan, atau dimodifikasi sehingga kondusif dalam menghadapi proses modernisasi, (3) juga ada yang benar-benar memiliki konsistensi secara relevansi dengan nilai-nilai yang baru.

Dalam kaitannya dengan modernisasi masyarakat dengan nilai-nilai tradisi ini, maka ditampilkan spesifikasi atau kualifikasi masyarakat modern, yaitu bahwa masyarakat atau orang yang tergolong modern adalah mereka yang terbebas dari kepercayaan terhadap tahyul. Konsep modernisasi digunakan untuk menamakan serangkaian perubahan yang terjadi pada seluruh aspek kehidupan masyarakat tradisional sebagai suatu upaya mewujudkan masyarakat yang bersangkutan menjadi suatu masyarakat industrial. Modernisasi selalu menunjukkan suatu perkembangan dari struktur sistem sosial, suatu bentuk perubahan

secara berkelanjutan pada aspek kehidupan ekonomi, politik, pendidikan, kebiasaan dan tradisi serta kepercayaan dari suatu masyarakat atau satuan sosial.

Modernisasi yang terjadi pada suatu kelompok satuan sosial atau masyarakat, menunjukkan suatu pengertian yang berkenaan dengan upaya-upaya untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sadar serta kondusif terhadap tuntutan dari tatanan kehidupan yang semakin mengglobal pada saat ini dan mendatang. Diharapkan dari proses menduniakan seseorang atau masyarakat yang bersangkutan, manakala dihadapkan pada arus globalisasi tatanan kehidupan manusia, suatu masyarakat tertentu tidaklah sekedar memperlihatkan suatu fenomena kebanggaan semata, tetapi diharapkan mampu merespons, melibatkan diri dan memanfaatkannya secara signifikan bagi eksistensi bagi dirinya, sesamanya, dan lingkungan sekitarnya.

Adapun spesifikasi sikap mental seseorang atau kelompok yang kondusif untuk mengadopsi dan mengadaptasi proses modernisasi adalah (a) nilai budaya atau sikap mental masyarakat yang senantiasa selalu berorientasi ke masa depan dan cermat akan ada niat untuk mencoba merencanakan masa depan yang lebih baik, (b) nilai budaya atau sikap mental masyarakat yang senantiasa memiliki hasrat untuk mengeksplorasi potensi-potensi sumberdaya alam dan terbuka bagi pengembangan dan mengadopsi inovasi dibidang iptek. Dalam hal ini, memang iptek bisa dibeli, dipinjam dan diambil alih dari iptek produk asing, namun dalam penerapannya memerlukan proses adaptasi yang sering lebih rumit daripada mengembangkan iptek baru, (c) nilai budaya atau sikap mental masyarakat yang siap menilai tinggi suatu prestasi dan tidak menilai tinggi status sosial, karena dengan status tersebut seringkali dijadikan menjadi suatu predikat yang

bernuansa gengsi pribadi yang sifatnya normatif, (d) nilai budaya atau sikap mental yang bersedia menilai tinggi usaha pihak lain yang mampu meraih prestasi atas kerja kerasnya sendiri.

Proses modernisasi yang sampai saat ini masih dimonopoli oleh masyarakat di perkotaan. Kota-kota yang berada di negara-negara berkembang menjadi pusat modernisasi yang diaktualisasikan oleh berbagai bentuk organisasi dan kegiatan pembangunan, baik dari sisi aspek fisik, material, sosiokultur, maupun aspek mental spiritual. Kecenderungan seperti inilah yang menyebabkan daerah perkotaan menjadikan daerah yang banyak menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi penduduk di pedesaan, terutama bagi generasi-generasi yang lebih muda. Obsesi semacam ini menjadi pendorong kuat bagi penduduk pedesaan untuk beramai-ramai membanjiri dan memadati setiap sudut daerah perkotaan, dalam suatu proses sosial yang disebut urbanisasi. Fenomena demografis seperti ini merupakan sumber permasalahan bagi kebijakan-kebijakan dalam upaya penataan ruang serta kehidupan masyarakat perkotaan. Sampai saat ini masalah diperkotaan masih menunjukkan gelagat yang semakin sulit dan semakin kompleks.

b) Orientasi Perubahan

Yang dimaksudkan orientasi atau arah perubahan di sini meliputi beberapa orientasi, antara lain (1) perubahan dengan orientasi pada upaya meninggalkan faktor-faktor atau unsur-unsur kehidupan sosial yang mesti ditinggalkan atau diubah, (2) perubahan merupakan orientasi pada suatu bentuk maupun unsur yang memang bentuk atau adanya unsur baru, (3) suatu perubahan yang berorientasi pada suatu bentuk, unsur maupun nilai yang sudah eksis maupun ada pada masa lampau. Tidaklah jarang kelompok masyarakat mengalami proses modernisasi pada

berbagai bidang kehidupan baik aspek ekonomis, birokrasi, pertahanan dan keamanan, bidang iptek, namun demikian perhatian masyarakat tidak luput untuk berupaya menyelusuri, mengeksplorasi dan menggali serta menemukan unsur-unsur atau nilai kepribadian serta jati diri sebagai bangsa yang bermartabat.

Dalam memantapkan orientasi suatu proses perubahan, ada beberapa faktor yang memberikan kekuatan pada gerak perubahan tersebut, yang antara lain adalah (a) suatu sikap, baik skala individu maupun skala kelompok, yang mampu menghargai karya pihak lain, tanpa dilihat dari skala besar atau kecilnya produktivitas kerja itu sendiri, (b) adanya kemampuan masyarakat untuk mentolelir adanya sejumlah penyimpangan yang terjadi dari rutinitas-rutinitas atau bentuk-bentuk, karena pada hakekatnya salah satu pendorong perubahan adalah adanya individu-individu yang menyimpang dari hal-hal yang rutin selama ini. Memang salah satu ciri yang hakiki dari mahluk yang disebut manusia adalah dengan sebutan homo deviant atau mahluk yang suka menyimpang dari rutinitas. (c) mengokohkan suatu kebiasaan atau sikap mental yang mampu memberikan penghargaan kepada pihak lain individual, kelompok yang berprestasi dalam berinovasi, baik dalam bidang sosial, ekonomi, dan iptek, (d). adanya atau tersedianya fasilitas dan pelayanan pendidikan dan pelatihan yang memiliki spesifikasi dan kualifikasi progresif, demokratis, dan terbuka bagi semua pihak yang membutuhkannya.

3. Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia

Dinamika sosial dan kebudayaan tidak terkecuali melanda masyarakat Indonesia, walaupun luas spektrum dan kecepatannya berbeda-beda. Demikian pula masyarakat dan kebudayaan Indonesia pernah berkembang dengan pesatnya dimasa lampau,

walaupun perkembangannya dewasa ini agak tertinggal apabila dibandingkan dengan perkembangan di negara maju lainnya. Betapapun, masyarakat dan kebudayaan Indonesia yang beranekaragam itu tidak pernah mengalami kemandegan sebagai perwujudan tanggapan aktif masyarakat terhadap tantangan yang timbul akibat perubahan lingkungan dalam arti luas maupun pergantian generasi. Adanya sejumlah kekuatan yang mendorong terjadinya perkembangan sosial budaya masyarakat.

Secara kategorikal ada 2 kekuatan yang memicu perubahan sosial, pertama adalah kekuatan dari dalam masyarakat sendiri, seperti pergantian generasi dan berbagai penemuan dan rekayasa setempat. Kedua adalah kekuatan dari luar masyarakat, seperti pengaruh kontak-kontak antar budaya secara langsung maupun persebaran unsur kebudayaan serta perubahan lingkungan hidup yang pada gilirannya dapat memacu perkembangan sosial dan kebudayaan masyarakat yang ada pada saat ini masyarakat diharuskan untuk menata kembali kehidupan mereka.

4. Perkembangan Sosial dan Kebudayaan Indonesia Saat Ini

Masyarakat Indonesia pada saat ini sedang mengalami perubahan dengan sangat cepat akibat dari tuntutan reformasi secara menyeluruh. Sedang tuntutan reformasi itu berpangkal pada kegiatan pembangunan nasional yang menerapkan teknologi maju untuk mempercepat pelaksanaannya. Dilain pihak tanpa disadari dengan penerapan teknologi maju menuntut acuan dari nilai-nilai budaya, norma-norma sosial yang telah ada akan terbentuk pada orientasi yang baru

Tidaklah mengherankan apabila masyarakat Indonesia yang majemuk dengan multi kulturalnya itu seolah-olah

mengalami kelimbungan dalam menata kembali tatanan sosial, politik dan kebudayaan dewasa ini:

a) Penerapan teknologi maju

Penerapan teknologi maju sangat mempercepat pembangunan dan menuntut pengembangan perangkat nilai-nilai budaya, norma sosial disamping ketrampilan dan keahlian tenaga kerja dengan sikap mental yang telah mendukungnya. Penerapan teknologi maju yang mahal biayanya itu memerlukan penanaman modal yang besar. Modal yang besar itu harus dikelola secara professional dibidang management agar dapat mendatangkan keuntungan materi seoptimal mungkin, karena ini juga memerlukan tenaga yang sangat terampil serta profesional dengan orientasi mengejar suatu keberhasilan. Tanpa disadari hal ini telah memacu perkembangan tatanan sosial disegala sektor kehidupan yang pada gilirannya sudah menimbulkan berbagai reaksi antara pro dan kontra dikalangan masyarakat. Dalam proses perkembangan nilai sosial budaya pada umumnya masyarakat telah memiliki banyak keunggulan dari aspek sosial politik, ekonomi serta teknologi dan yang keluar sebagai pemenang dalam persaingan. Akibatnya mereka yang tidak siap akan tergusur dan semakin terpuruk hidupnya, dan memperlebar serta memperdalam kesenjangan sosial yang pada gilirannya dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang memperbesar potensi konflik sosial dalam masyarakat majemuk dengan multi kulturnya.

b) Keterbatasan lingkungan

Penerapan teknologi maju yang mahal biayanya cenderung bersifat exploitatif dan expansif dalam pelaksanaannya. Untuk mengejar keuntungan materi seoptimal mungkin, mesin-mesin berat yang mahal harganya dan biaya perawatannya, mendorong

pengusaha untuk menggunakannya secara intensif tanpa mengenal waktu. Pembabatan di hutan secara besar-besaran tanpa mengenal waktu siang dan malam, demikian juga mesin pabrik harus bekerja terus menerus dan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang siap di lempar ke pasar. Pemenuhan bahan mentah yang diperlukan telah menimbulkan tekanan pada lingkungan yang pada gilirannya mengancam kehidupan penduduk yang dilahirkan, dibesarkan dan mengembangkan kehidupan di lingkungan yang di eksplotasi secara besar-besaran. Disamping itu dalam penerapan teknologi yang telah maju masyarakat juga cenderung tidak mengenal batas lingkungan geografik, sosial, kebudayaan maupun politik. Di mana ada sumber daya alam yang diperlukan untuk memperlancar kegiatan industri yang ditopang dengan peralatan modern, kesana pula mesin-mesin modern didatangkan dan digunakan tanpa memperhatikan kearifan lingkungan penduduk setempat.

Ketimpangan sosial budaya yang terjadi antar penduduk pedesaan dan perkotaan merupakan awal yang menjadi salah satu pemicu perkembangan norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya yang berfungsi sebagai kerangka acuan serta pedoman bagi masyarakat pedesaan yang harus mampu memperluas jaringan sosial secara menguntungkan. Apa yang seringkali dilupakan orang adalah lumpuhnya pranata sosial lama sehingga penduduk seolah-olah kehilangan pedoman dalam melakukan kegiatan. Walaupun pranata sosial itu masih ada, namun tidak berfungsi lagi dalam menata kehidupan penduduk sehari-hari. Seolah-olah terah terjadi kelumpuhan sosial seperti kasus lumpur panas Sidoarjo, pembalakan liar oleh orang kota, penyitaan kayu tebangan tanpa alasan hukum yang jelas, penguasaan lahan oleh mereka yang tidak berhak.

5. Dampak Perubahan Sosial Budaya

Fenomena perubahan sosial budaya yang terjadi sangat tergantung dari kemampuan masyarakat dalam mengarungi perubahan itu termasuk kesiapan dalam melakukan perubahan. Perubahan secara cepat dapat terjadi apabila ada keinginan umum untuk mendorong terjadinya perubahan itu, ada pemimpin, tujuan yang pasti, dan waktu yang tepat untuk melaksanakan perubahan yang cepat tersebut. Berdasarkan tingkat perubahan sosial yang terjadi, ada kalanya perubahan tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar dan mendasar, tetapi ada juga yang pengaruhnya tidak terlalu besar dan tidak mendasar. Perubahan yang amat mendasar dan memerlukan waktu yang panjang adalah perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri.

C. Pengembangan Lingkungan

Isu lingkungan sangat penting dalam menyadarkan masyarakat secara keseluruhan dan menjadi katalisator aksi masyarakat. Kita hidup di satu dunia terbatas, setiap warga negara memiliki tanggungjawab untuk melindungi ekosistem global. Perhatian terhadap lingkungan terkait dengan kebutuhan manusia yang mendesak seperti kelangsungan hidup, air bersih, makanan sehat dan udara bersih. Problem lingkungan adalah akibat tatanan sosial, ekonomi dan politik, maka problem lingkungan merupakan persoalan untuk seluruh masyarakat. Masukan ahli sangat penting yang berkaitan dengan solusi efektif berbasis masyarakat bukan solusi teknis yang diharuskan paradigma teknologi ilmiah. Pembangunan tidak harus bertentangan dengan pelestarian lingkungan hidup. Begitu pula sebaliknya pelestarian lingkungan hidup yang bertujuan untuk memelihara kelanggengan sumber alam tidak harus bertentangan dengan pembangunan. Oleh karena

pembangunan mengubah keadaan dan bersifat jangka panjang maka ada dua hal yang sangat penting, yaitu (1) memelihara kelestarian sumberdaya alam agar dapat digunakan terus-menerus menopang pembangunan jangka panjang, (2) memelihara kemantapan arah pembangunan agar tetap tertuju pada peningkatan kualitas hidup dengan ciri-ciri peningkatan kesejahteraan, kecerdasan, kehidupan dan keadilan sosial.

Secara umum pengembangan lingkungan adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pemeliharaan satwa terlindung, keutuhan taman hutan, pengendalian pencemaran, sampah dan buangan buatan manusia. Masalah pokok pengembangan lingkungan adalah bagaimana cara manusia memanfaatkan lingkungan hidup ini seperti hutan, sungai, laut dan pantai diolah manusia secara bertanggung jawab sehingga kekayaan alam ini dapat dimanfaatkan secara terus-menerus

Hakikat pokok pengembangan lingkungan ada lima ciri utama, yaitu sebagai berikut (1) memelihara proses alamiah secara terus-menerus bagi sumberdaya alam yang menopang kehidupan manusia dan pembangunan. (2) memanfaatkan sumberdaya alam dengan cara pelestarian dan peningkatan mutu sumberdaya alam. Oleh karena itu, penggunaannya harus secara berencana dan bertanggung jawab, (3) Memelihara dan mengembangkan keanekaragaman genetik organisme, asal mula setiap bentuk hidup dalam dunia binatang atau tumbuhan berdasarkan keturunan. Keanekaragaman tumbuh-tumbuhan, binatang, dan seluruh isi alam bergantung pada genetik organisme yang terkandung dalam diri makhluk itu, (4) mengusahakan pembangunan yang selaras antara hubungan manusia dengan lingkungan alam. Manusia dan alam adalah kesatuan yang tidak terpisahkan. Lingkungan sosial yang berkembang harus memiliki

ciri-ciri keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dalam diri manusia dan masyarakat, baik dalam hubungan dirinya dengan sesama manusia maupun dalam hubungan dirinya dengan lingkungan alam, (5) Sebenarnya segala kegiatan ada hubungan saling bergantung, karena dari hakikat lingkungan segala sesuatu terjaring dalam satu rangkaian. Oleh karena itu, pengembangan lingkungan ikut menentukan pengaruh atau dampak suatu kegiatan kepada lingkungan dan diperhatikan pula siklus lingkungan alam yang berlaku.

Pembangunan dengan prinsip berwawasan lingkungan merupakan suatu upaya dalam pembangunan yang berjalan secara berkesinambungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan ialah upaya sadar dan berencana dalam menggunakan dan mengelola sumberdaya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai suatu proses pembangunan yang memanfaatkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia sebesar-besarnya, tapi tetap menyeraskan potensi sumberdaya alam dengan manusia sebagai subjek dan objek dalam pembangunan.

Pandangan tentang pembangunan yang berwawasan lingkungan didasari oleh beberapa anggapan, diantaranya yaitu (1) proses pembangunan harus berlangsung terus-menerus, dengan ditopang oleh sumberdaya alam yang selalu tersedia dan dalam jumlah yang cukup, kualitas lingkungan yang baik, serta bertahan dalam waktu cukup lama, (2) sumberdaya alam terutama udara, air, dan tanah mempunyai ambang batas yang pemanfaatannya akan menyusut baik secara kuantitas maupun kualitas, (3) kualitas mutu lingkungan memiliki kaitan langsung dengan kualitas hidup. Semakin baik kualitas, maka semakin baik

pula mutu atau kualitas hidup, (4) pola pemanfaatan sumberdaya alam saat ini seharusnya memberikan kemungkinan berbagai pilihan penggunaan sumberdaya alam di masa mendatang, misalnya bahan bakar untuk kendaraan bermotor tidak selamanya harus menggunakan bensin atau solar, (5) pembangunan berkelanjutan harus dapat menjadi solidaritas antargenerasi, artinya sumberdaya alam yang tersedia sekarang tidak hanya dihabiskan untuk kesejahteraan generasi saat ini, tetapi dapat diwariskan bagi kesejahteraan generasi di masa mendatang, (6) mengembangkan kesadaran lingkungan kepada masyarakat. Sebagai masyarakat yang baik harus mengembangkan kesadaran lingkungan kepada masyarakat yang belum memahami dampak yang akan terjadi akibat lingkungan, jadi kita harus memberikan pengarahan terhadap masyarakat tersebut dengan tujuan supaya mereka dapat sadar akan pentingnya kesejahteraan lingkungan dan kesejahteraan manusia, (7) menghargai keanekaragaman hayati adalah dasar bagi tatanan dalam lingkungan. Pemeliharaan keanekaragaman hayati mempunyai kepastian bahwa sumberdaya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa mendatang. Sehingga dalam hal ini setiap ciri pembangunan berkelanjutan berupaya untuk menyatukan tiga, yaitu dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup menjadi suatu sinergi dalam meningkatkan kualitas manusia (a) dimensi ekonomi yang memfokuskan pada pertumbuhan, pemerataan, stabilitas, dan arif, (b) dimensi sosial yang mencakup pemberdayaan, peran serta, kebersamaan, mobilitas, identitas kebudayaan, pembinaan kelembagaan, dan pengentasan kemiskinan, (c) dimensi ekologi yang bertujuan untuk integritas ekosistem, ramah akan lingkungan, hemat dalam pemanfaatan sumberdaya alam, pelestarian keanekaragaman hayati serta tanggap terhadap isu global.

Dalam pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian pembangunan berwawasan lingkungan memiliki beberapa indikator, diantaranya yaitu:

- 1) *Culture-ecology-interface* yaitu indikator yang menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan fungsi yang terintegrasi dari nilai-nilai budaya yang menyatu terhadap ekosistem. Yang termasuk indikator ini adalah ukuran perubahan etika lingkungan, komitmen untuk menjaga keseimbangan *political cultural* dan *eco tourism*.
- 2) *Culture-economy interface* yaitu indikator yang menggambarkan fungsi tujuan di dalam termin nilai-nilai non market dan keputusan menjaga konservasi lingkungan untuk tujuan budaya. Dalam hal ini, nilai kultural ekonomi bernilai lebih tinggi.
- 3) *Economy-ecology interface*, yaitu indikator yang menggambarkan fungsi tujuan di dalam termin dari nilai-nilai ekonomi dan cost benefit analysis. Indikator dari pembangunan berkelanjutan dapat diukur dari cadangan konservasi alam dan ekonomi untuk kegiatan produksi serta pelayanan untuk generasi saat ini dan yang akan datang.

D. Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan kehutanan merupakan salah satu faktor utama mendukung keberhasilan dari pembangunan kehutanan. Kegiatan penyuluhan kehutanan pada hakikatnya adalah upaya pemberdayaan masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintah pusat dan daerah, serta pihak-pihak lain, yang terkait

dengan pembangunan kehutanan. Kegiatan penyuluhan kehutanan menjadi investasi dalam mengamankan dan melestarikan sumberdaya hutan sebagai aset negara, dan upaya mensejahterakan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kemampuan dan peningkatan kemandirian masyarakat agar mampu dan memiliki kapasitas untuk memecahkan sendiri masalah-masalah yang mereka hadapi. Dengan upaya pemberdayaan melalui penyuluhan kehutanan, masyarakat diharapkan mampu melakukan usaha-usaha di bidang kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya serta mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan untuk mengupayakan penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat serta pendampingan selama kegiatan. Melalui pendampingan diharapkan masyarakat dapat meningkatkan penguasaan teknologi, kapasitas, produktivitas dan kemampuan berusaha kearah kemandirian secara berkelanjutan dengan basis pembangunan kehutanan.

Keberadaan penyuluh kehutanan dalam menunjang pembangunan kehutanan, diperlukan tidak hanya di tengah masyarakat dalam atau sekitar kawasan hutan baik hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi yang rusak maupun yang masih baik, pada lahan-lahan masyarakat dan hutan-hutan rakyat, bahkan juga di daerah perkotaan atau hutan kota, penghijauan kota. Kehadiran penyuluh kehutanan yang melaksanakan tugas dan perannya dengan baik di suatu wilayah diharapkan akan dapat membawa dampak nyata dan positif terhadap kemajuan pembangunan kehutanan di wilayah tersebut, serta membawa

perubahan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hutan dan kehutanan.

Kegiatan penyuluhan kehutanan dilaksanakan oleh penyuluh kehutanan. Penyuluh Kehutanan adalah yang diberi tugas dan wewenang melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi yang memiliki kewenangan di bidang penyuluhan kehutanan. Tugas pokok penyuluh kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau pelaksanaan kegiatan, dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan penyuluhan.

Kegiatan pendampingan terutama diarahkan dalam fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat dan pendampingan kegiatan usaha ke arah masyarakat yang mandiri berbasis pembangunan kehutanan.

1. Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat.

Tahap awal merupakan kunci dalam proses pemberdayaan masyarakat, untuk melihat keberhasilan penyuluh dalam pembentukan dan pengembangan kelembagaan masyarakat di wilayah kerjanya. Penyuluh kehutanan harus berperan aktif dalam memfasilitasi penguatan dan peningkatan kapasitas pengetahuan serta pemahaman masyarakat bahwa sangat pentingnya kelompok dan kelembagaan yang kuat serta mandiri.

Pada gilirannya akan tumbuh kesepakatan, kerjasama, dan jaringan kerja antar kelompok, antar desa dan antar kecamatan. Indikator yang mencirikan telah terbentuk dan berkembangnya kelembagaan masyarakat yang kuat dan mandiri yaitu dengan kriteria sebagai berikut: (a) terbentuknya kelompok tani dengan SDM anggota masyarakat yang mantap, (b) memiliki organisasi

dan pengurus serta mempunyai tujuan yang jelas dan tertulis, (c) memiliki kemampuan managerial dan kesepakatan yang ditaati bersama.

2. Pendampingan Kegiatan Usaha Masyarakat

Peran penyuluh kehutanan dalam pendampingan kegiatan usaha masyarakat berbasis kehutanan harus dilaksanakan secara terus menerus sejalan dengan tingkat produktifitas, jenis aktifitas dan sistem kegiatan. Berkembangnya kegiatan dan usaha Kelompok Masyarakat Produktif Mandiri (KMPM) berbasis pembangunan kehutanan, mencirikan telah terwujudnya kemandirian secara sosial dan ekonomi. Beberapa kriteria telah berkembangnya KMPM berbasis pembangunan kehutanan antara lain adalah (a) telah berkembang kelompok masyarakat dengan sistem usaha dan aktivitas kegiatan yang produktif berbasis pembangunan kehutanan, (b) telah memiliki sumberdaya pendukung antara lain permodalan dan sarana prasarana, (c) telah berkembang akses teknologi dan akses pasar, (d) telah berkembang kemitraan dengan multipihak sehingga terjadi sinergi dalam pemanfaatan fungsi sumberdaya hutan yang optimal dan lestari, (e) kesejahteraan masyarakat secara sosial dan ekonomi meningkat.

Sistem usaha dan aktifitas kegiatan yang bersifat produktif dari KMPM berbasis pembangunan kehutanan dapat berupa kegiatan dengan orientasi (a) produksi hasil hutan: hutan produksi, hutan rakyat, hutan kemasyarakatan, agroforestry, dan aneka usaha kehutanan, (b) konservasi lingkungan pengendalian kebakaran hutan, penangkaran satwa, budidaya tanaman langka, perlindungan sumber air dan lain-lain, (c) usaha pemanfaatan jasa lingkungan: hutan wisata.

3. Penyuluh Kehutanan sebagai Pengorganisir Masyarakat

Penyuluh kehutanan diharapkan mampu mengorganisir masyarakat yaitu dengan memfasilitasi masyarakat dalam membentuk kelompok-kelompok organisasi yang peduli akan kelestarian hutan dan lingkungan. Untuk dapat menggerakkan dan memotivasi masyarakat, penyuluh kehutanan harus aktif, terpercaya, dan diakui integritasnya, serta mampu meyakinkan dan kompeten dalam bidang tugasnya. Beberapa indikator yang menunjukkan keberhasilan penyuluh dalam mengorganisir masyarakat antara lain (a) terbentuknya sentra penyuluhan di pedesaan, (b) berkembangnya forum-forum di desa atau kecamatan yang peduli akan hutan dan pembangunan kehutanan, (c) meningkatnya partisipasi masyarakat secara swadaya dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.

4. Penyuluh Kehutanan sebagai Pengawal Keberhasilan Pembangunan Kehutanan

Penyuluh kehutanan sangat diharapkan mampu dan berperan dalam mengawal keberhasilan dari setiap program-program pembangunan terutama dibidang kehutanan yang diprakarsai pemerintah. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat akan sangat menentukan suksesnya suatu program. Sosialisasi akan maksud dan tujuan serta manfaat dari suatu program perlu dilakukan agar timbul pemahaman yang baik dan menyeluruh. Dari hasil pengamatan lapangan, suatu program yang disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih signifikan. Sebaliknya kegiatan yang dilakukan tanpa melalui upaya penyuluhan tingkat keberhasilannya pada umumnya kurang menggembirakan.

Beberapa indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan peran penyuluh kehutanan dalam mengawal pembangunan kehutanan antara lain tercapainya volume fisik yang ditargetkan dan memenuhi kualitas yang dikehendaki, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap maksud dan tujuan kegiatan sehingga akan menjadi kebutuhan masyarakat. Kesiapan masyarakat untuk mengikutsertakan dana, aset, sarana dan prasarana, tenaga dalam upaya mensukseskan program penyuluhan kehutanan.

5. Penyuluh Kehutanan sebagai Pengaman Aset Negara yang Berupa Hutan

Berbeda dengan penyuluh bidang kegiatan lain, penyuluh kehutanan memiliki peran ganda yaitu di samping sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan, mereka juga mempunyai kewajiban untuk melakukan tugas perlindungan dan pelestarian hutan yang merupakan aset negara. Penyuluh kehutanan dituntut untuk mampu mengajak masyarakat merasa ikut memiliki dan wajib memelihara, mempertahankan, serta melindungi sumberdaya hutan dari berbagai gangguan keamanan hutan seperti kebakaran hutan, penebangan liar, perambahan, dan sebagainya. Beberapa indikator yang menunjukkan keberhasilan penyuluh kehutanan dalam membawakan perannya sebagai pengaman aset negara berupa hutan (a) telah terdapat kesepakatan desa dalam melarang penduduk desa menebang kayu di kawasan hutan, (b) telah ada upaya-upaya masyarakat sekitar hutan untuk mencegah terjadinya penebangan liar yang dilakukan pihak luar. (c) telah ada ketentuan-ketentuan desa untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. Keberhasilan seorang penyuluh kehutanan untuk melaksanakan perannya dengan baik, tentunya tidak dapat ditentukan oleh faktor internal dari si penyuluhnya sendiri saja, tetapi juga sangat tergantung pada faktor-faktor eksternal. Faktor

internal menyangkut kemampuan dan kualitas dari SDM penyuluhnya yang ditentukan oleh tingkat kompetensinya dalam menjalankan tugas. Faktor eksternal yang menentukan adalah perhatian serta dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

BAB V

PENYULUHAN MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN HUTAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat dalam satu wilayah tertentu, yang memiliki status hukum yang sama sebagai warga negara, setiap desa di suatu wilayah pasti memiliki adat istiadat dan potensi masing-masing. Ada banyak desa yang jauh dari pemerintahan pusat, baik kabupaten maupun kecamatan, untuk dapat memudahkan proses administrasi, baik itu tentang jumlah kependudukan, pembangunan desa di daerah kawasan hutan, keuangan, maka pemerintahan desa harus bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang.

1. Penyuluhan Masyarakat

A. Konsep Penyuluhan

Penyuluhan adalah proses pendidikan nonformal yang diberikan kepada keluarga tani dengan tujuan agar petani dapat memecahkan masalahnya sendiri khususnya dalam bidang pertanian dan meningkatkan pendapatannya. Penyuluhan merupakan proses penyebaran informasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara berusaha tani demi tercapainya pendapatan dan perbaikan kesejahteraan keluarganya.

Praktik penyuluhan yang bertujuan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik bukan pekerjaan yang mudah. Kegiatan penyuluhan sangat diwarnai dengan kegiatan transfer teknologi sampai dapat diadopsi oleh masyarakat dan menyebar dalam sistem sosial masyarakat, hal ini memerlukan energi yang sangat besar. Bahkan pada akhirnya, penyuluhan hanya difungsikan sebagai alat mencapai tujuan oleh pihak tertentu. Hal ini berimplikasi pada praktik penyuluhan yang sangat jauh dari filosofi yang seharusnya diterapkan. Kenyataan juga menunjukkan bahwa setiap program pembangunan apapun, selalu menempatkan penyuluhan sebagai bagian sublimatif yang tak terpisahkan. Bahkan ada kalangan yang mengatakan bahwa diabaikannya penyuluhan menjadi sebab dari berbagai kegagalan pembangunan. Kesadaran yang tidak banyak diakui secara jujur dan tidak diimbangi dengan upaya serius mengurusnya. Konsekuensinya, posisi yang demikian strategis tersebut seringkali kurang mendapat apresiasi yang memadai dalam masa yang cukup lama.

Peran penyuluh yang kompeten tidak semata dari sisi teknis, tetapi juga sisi sosial, dan mampu membangun jaringan dengan berbagai pihak sangat diperlukan. Perannya hendaknya bukan sebagai guru dan murid, tetapi dinamik, sebagai fasilitator, konsultan, dinamisator, dan motivator. Masyarakat petani sekitar kawasan hutan, pekerja sosial dan partisipan penyuluhan pembangunan lainnya dapat berperan sebagai mitra dalam membangun bangsa menuju masyarakat madani. Oleh karena itu, penyuluhan sebagai upaya pengembangan mutu sumberdaya manusia secara berkelanjutan dan peran strategisnya dalam pembangunan menuju masyarakat madani harus didukung oleh penyuluh yang memiliki kompetensi yang memadai dan

profesional selain itu karena tuntutan pergeseran peran yang sangat mendasar juga dinamika lingkungan strategis yang mengalami perubahan serta dinamika masyarakat yang mengalami perkembangan sangat pesat, maka sertifikasi penyuluh dan lembaga penyuluhan menjadi sebuah keharusan. Untuk keperluan itulah, maka dialog ini dirancang agar dapat menjadi media bertukar pengalaman, informasi, mengembangkan jaringan kerjasama antar akademisi, birokrat, praktisi dan pegiat penyuluhan guna mewujudkan sistem pelayanan penyuluhan yang berkualitas. Selain hal tersebut di atas, sarasehan dalam bentuk diskusi panel ini dirancang untuk menjadi arena bertukar pengalaman kalangan akademisi dan praktisi guna mendorong upaya pengembangan dunia penyuluhan yang lebih progresif, adaptif dan berkelanjutan.

Penyuluhan sebagai pendidikan diluar sekolah untuk keluarga tani di pedesaan, dengan cara belajar sambil berbuat sehingga mereka menjadi mau, tahu dan mampu menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapi secara baik, menguntungkan serta memuaskan. Penyuluhan suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan dan sarasanya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan sasaran. Karena sifatnya yang demikian itu maka penyuluhan biasa juga disebut pendidikan non formal. Dalam konteks yang lebih luas yaitu konteks pembangunan dengan mengembangkan ilmu penyuluhan pembangunan yang didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana pola perilaku manusia dapat berubah atau diubah sehingga mau meninggalkan kebiasaan yang lama dan menggantikannya dengan perilaku baru yang berakibat kualitas kehidupan orang yang bersangkutan menjadi lebih baik dan terjadi perubahan perilaku sarasanya. Dengan demikian penyuluhan dapat diartikan sebagai

proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan serta memiliki keterampilan dalam melaksanakan perubahan-perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai melalui pembangunan pertanian.

Penyuluhan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pola perilaku manusia terbentuk, perilaku manusia dapat berubah atau dirubah sehingga mau meninggalkan kebiasaan yang lama dan menggantinya dengan perilaku baru yang meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik melalui pendidikan informal. Proses pendidikan dan dorongan yang dilakukan pada penyuluhan pertanian ditujukan pada (1) menimbulkan perubahan dalam hal pengetahuan, kecakapan, sikap, dan motif tindakan kepada petani kearah tujuan yang telah ditentukan, (2) dengan menuntun dan mempengaruhi pikiran, perasaan dan kelakuan para petani kearah mencapai jarak dan tingkat semangat yang lebih baik, (3) menimbulkan dan memelihara semangat para petani supaya selalu giat memperbaiki usahataniannya, (4) membantu para petani agar mereka mampu memecahkan dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya.

Penyuluhan pertanian terdiri tiga komponen yaitu (1) kinerja pertanian, (2) pembangunan masyarakat pedesaan, dan (3) pendidikan non formal secara komprehensif untuk masyarakat pedesaan.

Tujuan penyuluhan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan dan merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu satu sampai dengan

lima tahun. Adapun tujuan penyuluhan adalah (1) mewujudkan kelembagaan penyuluhan yang tangguh, (2) meningkatkan profesionalisme penyuluh sebagai konsultan, pendamping, dan mitra petani serta pelaku usaha pertanian lainnya, (3) mewujudkan standarisasi dan akreditasi pada kelembagaan penyuluhan pertanian, (4) dengan mewujudkan system penerapan program penyuluhan pertanian partisipatif, (5) mewujudkan jejaring kerja penyelenggaraan penyuluhan pertanian. (6) meningkatkan sinergi antar lembaga dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

B. Penyuluhan Kehutanan

Pengelolaan sumberdaya hutan dilakukan secara bijaksana serta berkelanjutan telah menjadi kebijakan dari pemerintah dengan berbagai peraturan perundang-undangan beserta dengan kelengkapannya. Namun demikian dalam prakteknya telah terjadi pemanfaatan sumberdaya hutan secara berlebihan, penebangan liar/perambahan hutan dan kebakaran hutan yang tidak terkendali sehingga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, yang diindikasikan merosotnya fungsi hidrologis daerah aliran sungai.

Melihat kondisi kerusakan hutan pada saat ini yang sudah sangat mengawatirkan, maka perlu dilakukan perubahan paradigma pembangunan kehutanan dengan sistem pendekatan ekosistem sumberdaya hutan berbasis pemberdayaan masyarakat desa sekitar kawasan hutan. Pembangunan masyarakat desa dikawasan hutanan kedepannya diarahkan untuk memberikan peran serta partisipasi aktif dari masyarakat secara proporsional.

Penyuluhan kehutanan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan para pihak lainnya dalam pembangunan kehutanan, merupakan investasi untuk mengamankan dan melestarikan sumberdaya hutan sebagai aset negara.

Penyuluhan kehutanan memiliki peran yang sangat strategis, baik dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, serta upaya pelestarian sumberdaya hutan. Dua hal yang penting yang menjadi ciri-ciri penyuluhan kehutanan adalah penguatan kelembagaan serta pendampingan menuju masyarakat mandiri yang berbasis pembangunan kehutanan.

Dengan adanya pergeseran kebijakan pembangunan kehutanan dan tata pemerintahan yang melimpahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah serta perubahan tata sosial-budaya yang lebih transparan dan demokratis, sehingga diperlukan perubahan paradigma dan penataan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan yang disepahami oleh para pihak di pusat dan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan pedoman umum penyuluhan kehutanan yang dapat menjadi acuan utama bagi tim penyelenggara penyuluhan kehutanan.

Penyuluh sebagai tenaga ujung tombak, idealnya memainkan peran pendampingan terhadap kelompok yang melakukan kegiatan kehutanan. Sesuai dengan amanah dalam UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan, bahwa setiap jenis kegiatan pembangunan kehutanan baik aspek perencanaan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pemanfaatan hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam semuanya memerlukan dukungan penyuluhan kehutanan. Sehingga otomatis peran penyuluh kehutanan dalam setiap kegiatan kehutanan sangat diperlukan

Faktor penting dalam mendampingi kegiatan kehutanan adalah kompeten dalam bidang tersebut. Kompeten berarti memiliki kemampuan dan penguasaan aspek teknis kehutanan dari setiap program dan kegiatan kehutanan. Kompeten dibangun

dari unsur pengetahuan teknis yang melandasi suatu kegiatan, pengetahuan tentang petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis atau aturan yang melandasinya, keterampilan dalam melakukan kegiatan teknis kehutanan, keterampilan dalam memfasilitasi pembelajaran terhadap kelompok dan sikap kerja yang positif terhadap kegiatan tersebut.

Penyuluh kehutanan merupakan pendidikan non formal diluar bangku sekolah untuk melatih dan mempengaruhi petani (dan keluarganya) agar menerapkan praktek maju dalam bidang pertanian, peternakan, manajemen penyimpanan dan pemasaran. Tujuannya tidak hanya memperhatikan pendidikan dan percepatan penerapan praktek maju tertentu, tetapi juga mengubah pandangan petani, sehingga ia lebih bersedia menerima dan atas prakarsanya sendiri terus-menerus mencari cara untuk memperbaiki usaha taninya. Penyuluhan adalah suatu sistem atau pelayanan yang diarahkan untuk membantu masyarakat petani melalui proses pendidikan, memperbaiki tingkat kehidupan mereka, serta meningkatkan pendidikan dan standar sosial kehidupan pedesaan.

Departemen Pertanian Republik Indonesia mendefenisikan penyuluhan sebagai suatu upaya pemberdayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis terutama melalui pendidikan non formal di bidang pertanian agar mereka mampu menolong dirinya sendiri baik di bidang ekonomi, sosial dan politik sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan mereka. Sebagai kegiatan pendidikan, penyuluhan adalah upaya untuk membantu dan menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif bagi petani dan keluarganya, agar mereka dinamis dan berkemampuan untuk

memperbaiki kehidupannya dengan kekuatan sendiri sehingga mampu mewujudkan agribisnis yang sejahtera.

C. Tujuan Penyuluhan Kehutanan

Sesuai dengan dengan Pasal 56 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu untuk pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mampu mengubah sikap dan perilaku masyarakat serta mendukung pembangunan kehutanan atas dasar akan pentingnya sumberdaya hutan bagi kehidupan manusia.

Sasaran dari hasil penyuluhan program kehutanan adalah terwujudnya masyarakat mandiri yang berbasis pada pembangunan kehutanan. Sasaran kegiatan penyuluhan kehutanan adalah masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan kehutanan (1) masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, (2) kalangan dunia usaha yang bergerak di bidang kehutanan, (3) perlu adanya sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pada pembangunan kehutanan, (4) kalangan tokoh adat, pemuka agama dan generasi muda, (5) pihak lain yang berkaitan dengan sektor kehutanan.

Penyuluh sebagai tenaga ujung tombak dalam kenyataannya hanya bergerak pada bidang kehutanan tertentu saja, kebanyakan hanya pada beberapa kegiatan kehutanan yang berada di luar kawasan hutan. Sedangkan penyuluh kehutanan yang berada pada UPT PHKA, melakukan aktivitas penyuluhan pada kawasan konservasi. Masih banyak kegiatan kehutanan terutama aspek perencanaan hutan dan aspek pemanfaatan hutan masih belum mendapatkan dukungan penyuluh kehutanan.

D. Pedoman Penyuluhan Kehutanan

Pedoman umum untuk penyuluhan kehutanan ini adalah (1) penyuluhan kehutanan ialah proses pemberdayaan bagi masyarakat dalam mengembangkan pengetahuan serta sikap dan perilaku masyarakat sehingga yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mau menjadi mau dan yang tidak mampu menjadi mampu untuk melakukan usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya serta mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungan, (2) penyuluh kehutanan adalah yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi yang memiliki kewenangan dibidang penyuluhan kehutanan, (3) Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) adalah anggota masyarakat yang secara swadaya aktif dan berperan serta melaksanakan upaya-upaya penyuluhan kehutanan. (4) pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama masyarakat dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi dilapangan selanjutnya mendiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan kearah peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat, (5) pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menguatkan dan mengembangkan kelembagaan masyarakat serta pendampingan untuk meningkatkan penguasaan teknologi, kapasitas, produktivitas dan kemampuan berusaha kearah kemandirian secara berkelanjutan. (6) Kelompok Masyarakat Produktif Mandiri (KMPM) adalah suatu lembaga masyarakat yang dibentuk dan dikembangkan secara partisipatif, bergerak dibidang usaha kehutanan yang bersifat produktif berbasis ekonomi, lingkungan, sosial, budaya dan agama, (7) masyarakat mandiri berbasis pembangunan kehutanan adalah

masyarakat yang memiliki kelembagaan yang kuat, produktifitas, kemampuan dan kemandirian secara sosial budaya, ekonomi dan lingkungan masyarakat berbasis sumberdaya hutan lestari, serta memiliki pemahaman tentang fungsi dan manfaat hutan sebagai penyangga kehidupan, sehingga berpartisipasi aktif dalam pelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan.

2. Landasan Hukum Penyuluhan Kehutanan

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.
6. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
7. Permenhut RI No. P.78/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang- Undang No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan pengaturan sistem penyuluhan meliputi pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan modal sosial. Dalam ayat penjelasannya disebutkan

bahwa pengembangan sumberdaya manusia antara lain peningkatan semangat, wawasan, kecerdasan, ketrampilan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membentuk kepribadian yang mandiri. Sedangkan peningkatan modal sosial antara lain pembentukan kelompok, gabungan kelompok, manajemen, kepemimpinan, akses modal dan akses informasi.

Dalam Keputusan Menteri Kehutanan 132/Menhut-II/2004 tentang Pedoman Umum Penyuluhan Kehutanan, yang dimaksud dengan penyuluhan kehutanan pada intinya adalah proses pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya untuk menguatkan serta mengembangkan sistim kelembagaan masyarakat serta pendampingannya. Kelembagaan masyarakat adalah kelompok masyarakat didalam dan di sekitar hutan yang dibentuk dan dikembangkan secara partisipatif, bergerak dibidang usaha kehutanan yang bersifat produktif berbasis ekonomi, lingkungan ,sosial , budaya dan agama.

Seringkali masyarakat yang tinggal didalam dan sekitar hutan dibuat tidak berdaya hanya karena aturan perundangan yang mengukungnya, meskipun mereka telah menetap turun temurun beberapa generasi disana. Akses masuk kekawasan hutan selama ini malah makin hari makin dipersulit. Dengan telah terbitnya PP No 6 Tahun 2007 pengganti PP No.34 Tahun 2002, maka akses masyarakat kekawasan hutan makin dibuka dan dipermudah. Masyarakat tidak hanya dianggap sebagai obyek tetapi dianggap sebagai subyek yang harus terlibat dalam pemanfaatan kawasan hutan yang telah menghidupinya bertahun tahun.

Dalam kegiatan hutan desa pelibatan kelompok masyarakat terdapat dalam pasal 87 (1) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat setempat melalui hutan desa dilakukan

dengan memberikan hak pengelolaan kepada lembaga desa. Sedangkan dalam kegiatan hutan kemasyarakatan terdapat dalam pasal 96 (ayat 3) yang menyatakan bahwa IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan Kemasyarakatan) diberikan kepada kelompok masyarakat setempat berupa koperasi.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan hutan desa, hutan kemasyarakatan dan kemitraan. Pada areal hutan yang belum dibebani ijin pemanfaatan hutan atau hak pengelolaan hutan, dilakukan melalui hutan desa dan hutan kemasyarakatan. Sedangkan pada areal yang telah dibebani ijin pemanfaatan hutan, pemberdayaan masyarakatnya dapat dilakukan dengan pola kemitraan.

Salah satu kegiatan baru dan sedang digalakkan pemerintah sekarang adalah kegiatan hutan tanaman rakyat. Meskipun aspek bisnis (ekonomi) ditonjolkan sebagaimana Hutan Tanaman Industri, namun tak kalah pentingnya unsur pemberdayaan masyarakat sangat kuat. Masyarakat didalam dan disekitar hutan harus menjadi subyek dalam kegiatan ini dengan membentuk kelompok berupa koperasi.

3. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan

A. Azas prioritas pembangunan.

Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan harus memadukan dan searah dengan prioritas pembangunan di tingkat pusat dan daerah, yaitu pemberantasan penebangan liar, penanggulangan kebakaran hutan, restrukturisasi sektor kehutanan, rehabilitasi dan konservasi hutan serta penguatan desentralisasi kehutanan agar pelaksanaan pembangunan kehutanan dapat terfokus yang mengarah pada pemecahan akar

permasalahan sehingga keberhasilan pembangunan kehutanan lebih optimal.

B. Keterpaduan dan pemberdayaan.

Pelaksanaan kebijakan pembangunan kehutanan yang dilakukan melalui pendekatan program nasional yaitu social forestry yang melibatkan keterpaduan antar sektor pusat dan daerah serta memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraannya; dan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan atau GERHAN dengan memberdayakan berbagai pihak terkait pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dan LSM dalam penyelamatan hutan dan lingkungan di wilayah daerah aliran sungai.

C. Paradigma penyuluhan kehutanan.

Sejalan dengan arah dan kebijakan utama pembangunan kehutanan dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, maka telah dilakukan penyuluhan kehutanan yang semula dipahami sebagai proses alih informasi dan teknologi serta merubah sikap dan perilaku masyarakat, pemahamannya berubah menjadi penyuluhan kehutanan yang merupakan proses pemberdayaan masyarakat serta berbasis pembangunan kehutanan.

D. Visioner dan berkelanjutan.

Pelaksanaan penyuluhan kehutanan yang efektif, efisien dan profesional akan lebih terjamin apabila terdapat dalam visi dan misi organisasi yang berkelanjutan. Visi dari penyuluhan kehutanan adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri yang

berbasis pembangunan kehutanan dan misi dari penyuluhan kehutanan adalah (1) memantapkan serta mengembangkan sistim kelembagaan penyuluhan kehutanan, (2) memberdayakan masyarakat berbasis pembangunan kehutanan dengan pendekatan penguatan kelembagaan dan pendampingan, (3) mengembangkan jaringan kerja dan kemitraan penyuluhan kehutanan.

4. Perencanaan Penyuluhan Kehutanan

A. Program Penyuluhan Kehutanan

Program penyuluhan adalah rencana tertulis tentang kegiatan penyuluhan yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang ingin dicapai, masalah-masalah dalam mencapai tujuan dan alternatif terbaik untuk memecahkan masalah diwilayah masing-masing penyuluh pertanian. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP) oleh PPL dapat berjalan dengan baik, bila pelaksanaannya berpedoman pada program penyuluhan pertanian. Program penyuluhan pertanian dibuat setelah penyuluh mengetahui gambaran umum tentang kondisi dan situasi usahatani yang tengah dilakukan di pedesaan terutama mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh para petani, sehingga dapat diprioritaskan kegiatan penyuluh tersebut.

Jadwal kegiatan yang disusun oleh penyuluh dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) dibuat berdasarkan program penyuluhan setempat yang di lengkapi dengan hal-hal yang dianggap perlu untuk berintegrasi dengan pelaku utama dan pelaku usaha. Program penyuluhan yang baik adalah program yang dibuat dengan memperhitungkan serta mempertimbangkan gambaran-gambaran yang tersusun dalam monografi wilayah, terutama situasi dan kondisi serta masalah-masalah yang ada atau

tengah dihadapi oleh para petani, peranan dan kemampuan penyuluh, alat-alat pembantu penyuluh serta hambatan-hambatan yang mungkin timbul selama pelaksanaannya.

Program rencana kerja penyuluhan pertanian adalah lanjutan dari program penyuluhan, yaitu dibuat berdasarkan program penyuluhan pertanian yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian, sinkronisasi program penyuluhan pertanian dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi penyuluhan pertanian meliputi (a) melakukan kegiatan penyuluhan untuk mengembangkan kemampuan petani/nelayan dalam menguasai materi penyuluhan, (b) memanfaatkan dan menerapkan teknologi baru sehingga mampu bertani lebih baik, (c) berusaha lebih menguntungkan, (d) membina kehidupan berkeluarga yang sejahtera.

Adanya perubahan kebijakan dibidang pembangunan kehutanan yang salah satunya adalah penguatan desentralisasi sektor kehutanan, maka perlu adanya dalam penyempurnaan sistem, penataan kelembagaan, metode perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi dalam penyuluhan kehutanan. Sehubungan dengan strategi pembangunan dibidang penyuluhan kehutanan adalah (1) peningkatan fungsi serta peran lembaga penyuluhan kehutanan baik dipusat dan daerah dalam mendukung sistim desentralisasi dibidang kehutanan, (2) peningkatan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia penyuluhan kehutanan, (3) pengembangan sistem dan metoda penyuluhan kehutanan sesuai kebutuhan untuk mendukung pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, (4) pengembangan sarana prasarana yang pendukung program penyuluhan kehutanan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pembangunan kehutanan secara berkelanjutan. (5) pemberdayaan

masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kemandirian masyarakat yang berbasis pembangunan kehutanan guna meningkatkan kesejahteraannya dengan pendekatan social forestry, (6) peningkatan sinergitas lintas sektor dan instansi, dunia usaha serta lembaga swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan, (7) untuk mengoperasionalisasikan strategi penyuluhan kehutanan tersebut maka ditetapkan enam program penyuluhan kehutanan yang bersifat jangka menengah, terintegrasi, lintas sektor, dan berkelanjutan, (8) penetapan program penyuluhan kehutanan dimaksudkan sebagai acuan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam perencanaan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan yang meliputi rencana jangka menengah dan rencana tahunan. Melalui penerapan program pemberdayaan masyarakat desa sekitar kawasan hutan perlu adanya penyuluhan kehutanan akan diperoleh kesepahaman dalam persepsi, tujuan dan sasaran pemberdayaan serta sinergitas kegiatan sehingga keberhasilan tim penyuluhan kehutanan dan masyarakat dapat tercapai secara optimal dan terukur.

Program penyuluhan kehutanan sebagai berikut (1) pemantapan kelembagaan penyuluhan kehutanan. Tujuannya untuk memantapkan kelembagaan penyuluhan kehutanan di pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung desentralisasi di bidang kehutanan, (2) pengembangan sumberdaya penyuluhan kehutanan. Tujuannya untuk menyiapkan sumberdaya manusia penyuluhan kehutanan sesuai dengan kebutuhan, berkualitas dan profesional serta pembinaan karier penyuluh kehutanan, (2) pengembangan sistem, metode dan materi penyuluhan kehutanan. Tujuannya untuk mengembangkan sistem, metode dan

materi penyuluhan kehutanan sesuai dengan perkembangan teknologi, tuntutan pembangunan kehutanan dan kondisi lokal spesifik, (3) optimalisasi sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan. Tujuannya utamanya adalah untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan serta pemanfaatan sarana, prasarana dan alat bantu secara optimal, (4) pemberdayaan masyarakat berbasis pembangunan kehutanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas, produktifitas, kemampuan, dan kemandirian masyarakat sebagai penggerak utama dalam pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan mendukung terwujudnya peningkatan ekonomi kerakyatan, (5) Pengembangan jejaring kerja dan kemitraan. Tujuannya adalah untuk mendorong berkembangnya jejaring kerja juga kemitraan lintas sektor, dunia usaha dan masyarakat dan beberapa pihak lainnya sehingga penyelenggaraan penyuluhan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

B. Jenis dan Mekanisme Penyusunan Rencana

Rencana penyelenggaraan penyuluhan kehutanan terdiri atas rencana jangka menengah/rencana kerja lima tahun (RKLT) dan rencana jangka pendek/rencana kerja tahunan (RKT), serta program penyuluhan kehutanan sebagai berikut :

1) Rencana Kerja Lima Tahun (RKLT).

Rencana Kerja Lima Tahun Penyuluhan Kehutanan adalah rencana jangka menengah yang bersifat strategis, memuat keadaan dan potensi wilayah, permasalahan dan analisis lingkungan strategis, kebikajian dan prioritas program penyuluhan kehutanan, metode dan kegiatan pokok dari lembaga-lembaga penyelenggara, pengembangan sumberdaya dibidang penyuluhan kehutanan, serta sumberdaya pendukung lainnya. RKLT penyuluhan

kehutanan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT).

RKLT Penyuluhan Kehutanan yang disusun oleh instansi di Provinsi/ Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan di bidang kehutanan, dan disahkan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota. Dalam proses penyusunan RKLT dibidang Penyuluhan Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota dan sebelum disahkan oleh pejabat yang berwenang, pada tahap awal terlebih dahulu dilakukan konsultasi publik dengan para pihak lain untuk memperoleh masukan dan kesepakatan bersama.

2). Rencana Kegiatan Tahunan (RKT).

Rencana Kegiatan Tahunan Penyuluhan Kehutanan adalah rencana jangka pendek atau pertahun dan bersifat operasional yang memuat keadaan karakteristik wilayah, permasalahan, program tahunan, kegiatan dan lokasi penyuluhan kehutanan, institusi pelaksana terkait, sarana dan prasarana serta rencana anggaran sebagai landasan pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dalam jangka waktu satu tahun.

RKT Penyuluhan Kehutanan yang disusun oleh unit kerja pada dinas yang mempunyai tugas pokok dalam penyuluhan kehutanan, dan disahkan oleh Kepala Dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan kehutanan. Penyusunan RKT Penyuluhan Kehutanan mengacu pada RKLT Penyuluhan Kehutanan, dan dalam proses penyusunannya dikoordinasikan dengan Dinas/Instansi yang terkait dan dikonsultasikan dengan publik untuk memperoleh masukan dan kesepakatan bersama.

C. Program Penyuluhan Kehutanan (PPK).

Program Penyuluhan Kehutanan adalah rencana kerja kelompok jabatan fungsional penyuluh kehutanan, memuat keadaan karakteristik wilayah kerja, permasalahan, metode dan teknik penyuluhan, rencana detail kegiatan dan lokasi sasaran, rencana anggaran serta sarana atau alat bantu penyuluhan kehutanan. Penyusunan PPK mengacu pada RKLK dan RKT Penyuluhan Kehutanan yang selanjutnya dinilai dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

PPK dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan dan menjadi acuan bagi para penyuluh kehutanan untuk menyusun Rencana Kerja Penyuluh Kehutanan (RKPK) di wilayah binaannya untuk jangka waktu satu tahun. RKPK di nilai dan disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

D. Tugas Pokok Penyuluh

Sistem kerja penyuluhan dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya sebagai penyuluh pertanian baik berhadapan langsung dengan khalayak sasaran utama petani maupun unsur-unsur pendukung lainnya seperti aspirasi petani dan keluarganya, kebijaksanaan pembangunan pertanian, program penyuluhan pertanian, sumber informasi teknologi, inovasi sosial ekonomi serta pendekatan, metode, teknik penyuluhan pertanian harus mampu menampilkan kelangsungan proses belajar-mengajar, yang dilandasi dengan interaksi, komunikasi dan penampilan berbagai aspirasi dalam kegiatan usahatani. Untuk itu diperlukan sistem penyuluhan yang partisipatif, dengan komitmen bekerja berdasarkan kebutuhan petani dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No.9/KEP/MK.Waspan/5/1999, tugas pokok penyuluh pertanian adalah: (a) menyiapkan penyuluhan yang meliputi identifikasi potensi wilayah agroekosistem, penyusunan program penyuluhan pertanian dan penyusunan rencana kerja penyuluhan pertanian, (b) melaksanakan penyuluhan meliputi penyusunan materi penyuluhan pertanian, penerapan metode penyuluhan pertanian dan pengembangan keswadayaan masyarakat, (c) evaluasi dan pelaporan penyuluhan, (d) pengembangan penyuluhan meliputi penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyuluhan pertanian, perumusan kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan pertanian dan pengembangan metode dan sistem kerja penyuluhan pertanian, (e) pengembangan profesi penyuluhan meliputi penyusunan karya tulis ilmiah penyuluhan pertanian, penerjemahan atau penyaduran buku penyuluhan pertanian dan bimbingan penyuluh pertanian, (f) penunjang penyuluhan meliputi seminar dan lokakarya penyuluhan pertanian serta mengajar pada diklat bidang penyuluhan.

5. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan

A. Metode, Materi Dan Kegiatan Pokok

1. Metode dan Materi

Metode penyuluhan kehutanan yang dilaksanakan secara partisipatif baik individual maupun secara kelompok dengan menggunakan berbagai media komunikasi, antara lain: media cetak dengan brosur dan elektronik serta alat bantu penyuluhan kehutanan yang sesuai dengan kebutuhan dilapangan. Proses penyuluhan kehutanan dilaksanakan melalui pendekatan fasilitasi

dan pendampingan secara terus menerus dalam penguatan kelembagaan, peningkatan kemampuan dan kapasitas, sehingga tercapai kemandirian masyarakat berbasis pembangunan kehutanan.

Materi penyuluhan kehutanan yang bersifat substantif kegiatan pembangunan kehutanan pada prinsipnya meliputi (a) kebijakan dan kegiatan rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial, (b) kebijakan dan kegiatan pelestarian hutan dan konservasi alam, (c) kebijakan dan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi hutan alam dan hutan tanaman, (d) kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pemantapan kawasan hutan di bidang planologi kehutanan.

Materi penyuluhan kehutanan pada umumnya mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan pembangunan kehutanan, yaitu (a) aspek teknologi, yaitu untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas usaha bidang kehutanan serta tetap memperhatikan keberadaan kearifan lokal, (b) aspek manajemen, antara lain untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dilapangan, (c) aspek ekonomi, berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya hutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa sekitar kawasan hutan yang meliputi antara lain modal, sarana produksi, akses potensi sumber daya dari desa, peluang usaha, akses informasi pasar, (d) aspek ekologi, berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya kelestarian sumber daya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan bagi kesejahteraan masyarakat, (e) aspek sosial budaya, antara lain untuk mengembangkan kondisi sosial dan kesadaran kultural dengan memperhatikan adat setempat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan, (f) aspek

hukum, antara lain pemberian informasi tentang peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat menyadari hak dan kewajibannya khususnya yang berkaitan dengan bidang kehutanan.

a. Kegiatan Pokok

Identifikasi dan penetapan kegiatan pokok masing-masing program penyuluhan kehutanan dimaksudkan agar pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dapat lebih terarah dalam memberikan dukungan terhadap pembangunan kehutanan dan desentralisasi penyuluhan kehutanan. Sinergitas pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, juga dunia usaha, masyarakat serta para pihak lainnya dalam memilih, menetapkan kegiatan pokok penyuluhan kehutanan sebaiknya memperhatikan kondisi karakteristik wilayah serta keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat serta potensi sumberdaya pendukung daerah yang bersangkutan.

Uraian kegiatan pokok masing-masing program dalam penyuluhan kehutanan masyarakat desa kawasan hutan sebagai berikut :

- a. Pemantapan Kelembagaan Penyuluhan Kehutanan, meliputi :
- 1) Penyusunan rencana dan program penyuluhan kehutanan.
 - 2) Penyusunan program penyuluh kehutanan.
 - 3) Penyiapan dan penyempurnaan peraturan penyuluhan kehutanan.
 - 4) Pemantapan organisasi dan tata hubungan kerja penyuluhan kehutanan.
 - 5) Pengelolaan administrasi jabatan fungsional penyuluh kehutanan.

- 6) Pembinaan, evaluasi dan pengendalian penyuluhan kehutanan.
- b. Pengembangan SDM Penyuluhan Kehutanan, meliputi :
- 1) Pendidikan untuk penyuluh kehutanan adalah tingkat D4/S1, S2, S3.
 - 2) Pelatihan, penyegaran dan konsultasi teknis penyuluh kehutanan.
 - 3) Merekrut tenaga baru SDM penyuluhan kehutanan serta pengembangan penyuluh kehutananswadaya masyarakat.
 - 4) Temu karya, workshop dan seminar penyuluhan kehutanan.
- c. Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan, meliputi:
- 1) Pengembangan metode dan materi penyuluhan pemberantasan penebangan liar.
 - 2) Pengembangan metode dan materi dalam penyuluhan serta penanggulangan kebakaran sekitar kawasan hutan.
 - 3) Pengembangan metode dan materi penyuluhan rehabilitasi hutan, lahan, konservasi tanah dan air.
 - 4) Pengembangan metode dan materi penyuluhan konservasi sumberdaya alam
 - 5) Pengembangan metode dan materi penyuluhan restrukturisasi sektor kehutanan.
 - 6) Pengembangan metode dan materi penyuluhan desentralisasi sektor kehutanan dan peraturan perundang-undangannya.
 - 7) Pengembangan metode dan materi penyuluhan social forestry.

- d. Optimalisasi Sarana Prasarana Pendukung Penyuluhan Kehutanan, meliputi:
- 1) Pengembangan model penyuluhan kehutanan terpadu.
 - 2) Pengembangan dan peningkatan sarana, prasarana serta alat bantu dalam penyuluhan kehutanan.
 - 3) Pendayagunaan dan pemanfaatan unit-unit percontohan sebagai sarana penyuluhan kehutanan kepada masyarakat agar masyarakat lebih percaya akan program yang ditawarkan.
- e. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pembangunan Kehutanan, meliputi:
- 1) Penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat.
 - 2) Pengembangan kelembagaan usaha masyarakat berbasis agrisilvobisnis.
 - 3) Pendampingan pengembangan kelompok masyarakat produktif mandiri.
 - 4) Peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat berbasis pembangunan kehutanan.
 - 5) Kampanye dalam penyuluhan kehutanan harus sesuai dengan rangka pengelolaan hutan yang lestari.
- f. Pengembangan Jejaring Kerja serta Kemitraan dalam Penyuluhan Kehutanan, meliputi:
- 1) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) penyuluhan kehutanan.
 - 2) Pengembangan jejaring kerja tim penyuluhan kehutanan dengan lintas sektor bersama dengan para pihak lainnya.
 - 3) Pengembangan kerja sama dengan Perguruan Tinggi/lembaga pendidikan, dan lembaga luar negeri.
 - 4) Pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan LSM.

B. Lembaga Penyuluhan Kehutanan

1. Pemerintah

Dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dilaksanakan oleh unit organisasi tersendiri secara terstruktur, dengan tugas pokok dan fungsi yang tegas dan jelas yang didukung oleh sumberdaya manusia penyuluhan kehutanan, dana, dan sarana prasarana, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Pemerintah Pusat

Penyuluhan kehutanan yang di tingkat Pusat dilaksanakan oleh unit organisasi Eselon II dengan tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan desa melalui penyuluhan kehutanan, yang terdiri atas unit struktural serta kelompok jabatan fungsional yaitu penyuluh kehutanan.

Tugas pokok dari suatu organisasi penyuluhan kehutanan di tingkat pusat adalah sebagai berikut :

- a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan perencanaan secara makro atau nasional dan penyuluhan kehutanan sejalan dengan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan.
- b) Menyusun kriteria serta standar dan pedoman penyuluhan kehutanan.
- c) Mengembangkan sistem, kelembagaan, metode dan SDM dari tim penyuluh kehutanan.
- d) Melakukan pembinaan, bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan kerjasama penyuluhan kehutanan di dalam dan luar negeri.

2) Pemerintah Provinsi

Penyuluhan kehutanan di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh unit organisasi setingkat Eselon III yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang penyuluhan kehutanan, yang terdiri atas unit struktural dan kelompok jabatan fungsional penyuluh kehutanan.

Tugas pokok unit organisasi penyuluhan kehutanan di tingkat propinsi adalah sebagai berikut :

- a) Menetapkan kebijakan regional serta perencanaan penyuluhan kehutanan di wilayah propinsi dan lintas kabupaten/kota, sesuai arahan dan kebijakan prioritas dalam pembangunan kehutanan.
- b) Melakukan koordinasi sesama jejaring kerja dan fasilitasi penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di wilayah propinsi.
- c) Melaksanakan penyusunan pedoman operasional penyuluhan, sistem informasi manajemen, serta pelatihan yang berkaitan dengan penyuluhan kehutanan.
- d) Melaksanakan kegiatan pembinaan secara teknis, melaksanakan pemantauan di lapangan serta evaluasi penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.
- e) Melaksanakan tugas-tugas secara dekonsentrasi penyuluhan kehutanan.

3) Pemerintah Kabupaten/Kota

Penyuluhan kehutanan di tingkat Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh unit organisasi setingkat Eselon III atau serendah-rendahnya setingkat Eselon IV yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang penyuluhan

kehutanan, yang terdiri atas unit struktural dan kelompok jabatan fungsional penyuluh kehutanan. Penempatan kelompok penyuluh kehutanan dapat berada di bawah unit organisasi pada Dinas Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kehutanan atau berada di instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi khusus dibidang penyuluhan, termasuk penyuluhan kehutanan.

Tugas pokok lembaga penyuluhan kehutanan Kabupaten/Kota adalah (a) merumuskan dan menetapkan kebijakan program dan perencanaan penyuluhan kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota, sesuai arahan dan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan, (b) selalu melakukan koordinasi serta integrasi lintas instansi, lintas dunia usaha, dan masyarakat yang terkait dengan penyuluhan kehutanan di daerah, (c) melaksanakan pengelolaan menetapkan, mengangkat dan membina pejabat fungsional penyuluh kehutanan, (d) melakukan kegiatan pengembangan terutama SPKP dan pembinaan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat.

2. Dunia Usaha

Penyelenggaraan dalam penyuluhan kehutanan dilaksanakan oleh pelaku usaha yang bergerak dibidang kehutanan yang mempunyai fungsi dalam pemberdayaan masyarakat antara lain badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, badan usaha milik daerah, koperasi dan kelompok usaha lainnya. Peran serta dari dunia usaha dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan, adalah (a) sebagai mitra kerja pemerintah dalam melaksanakan

penyuluhan kehutanan yang sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan kehutanan, (b) melakukan kemitraan usaha bersama pihak kehutanan dengan masyarakat beserta para pihak lainnya, (c) melaksanakan fasilitasi dan integrasi kegiatan dengan para pihak yang terkait, (d) mengembangkan jejaring kerja penyuluhan kehutanan.

3. Masyarakat

Kelembagaan masyarakat baik secara kelompok maupun dari perorangan merupakan salah satu kunci yang menentukan keberhasilan dari program penyuluhan kehutanan. Tanpa adanya kelembagaan masyarakat yang kuat, maka peningkatan kapasitas dan kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat tidak akan tercapai. Dasar pertimbangan terbentuknya kelembagaan masyarakat adalah kesepakatan bersama yang tumbuh dari masyarakat sendiri, misalnya kelompok masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok masyarakat lainnya dengan kegiatan usaha berbasis pada pembangunan kehutanan.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan, antara lain (a) sebagai mitra kerja pemerintah dan berpartisipasi aktif dalam penyuluhan kehutanan pada khususnya dan pembangunan kehutanan pada umumnya, (b) sebagai penyuluh kehutanan swadaya masyarakat menjadi mitra kerja penyuluh kehutanan untuk membangun dan menguatkan kelembagaan serta melaksanakan pendampingan kepada masyarakat lainnya, (c) sebagai penggerak utama dalam peningkatan kapasitas, produktifitas dan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dan mendukung bergeraknya roda perekonomian daerah, (d) dengan kesadaran penuh melakukan kontrol sosial dalam rangka pencegahan dan

penanggulangan kerusakan sumberdaya hutan yang disebabkan oleh antara lain : penebangan liar, kebakaran hutan, perdagangan gelap, perambahan kawasan hutan, banjir, dan lahan kritis.

C. Sumber Daya Manusia Penyuluh Kehutanan

Dukungan pengembangan sumberdaya manusia penyuluh kehutanan adalah upaya-upaya yang dilakukan unit kerja tempat penyuluh kehutanan bernaung, dalam rangka pengembangan kemampuan penyuluh melalui berbagai kegiatan dan penyediaan kesempatan penyuluh untuk pengembangan dirinya. Dukungan pengembangan penyuluh meliputi pendayagunaan penyuluh oleh unit kerja, kesempatan pengembangan yang disediakan oleh unit kerja, jejaring kerja yang dibangun penyuluh dan potensi pengembangan yang bisa dilakukan penyuluh.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai tantangan pembangunan kehutanan dimasa mendatang maka penyuluhan kehutanan perlu didukung oleh sumberdaya manusia penyuluh kehutanan yang handal dan profesional. Untuk itu penyuluh kehutanan harus mampu dan memiliki kompetensi yang memenuhi persyaratan serta kriteria, sebagai berikut (1) menguasai teknologi penyuluhan yang meliputi metode, materi, komunikasi, teknik fasilitasi dan teknik pendampingan, (2) menguasai pengetahuan dan teknik pemberdayaan masyarakat, (3) memiliki pengetahuan dan substansi bidang kehutanan. (4) memahami pengetahuan sosial ekonomi di bidang agrisylvobisnis.

Pembinaan dalam profesionalisme tenaga penyuluh kehutanan dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan baik dari dalam dan luar negeri. Pembinaan karier pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan antara lain melalui pelayanan optimal

penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Angka Kredit baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Pengembangan tenaga PKSM yang berasal dari lapisan masyarakat/LSM, perlu difasilitasi serta pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan atau dunia usaha.

Dari segi kebijakan, sebenarnya landasan aturan mengenai pendampingan penyuluh kehutanan terhadap berbagai kegiatan kehutanan sudah cukup kuat. Dari amanah UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, tersirat bahwa penyuluhan kehutanan sebagai pendukung pembangunan kehutanan yang menyediakan sumberdaya manusia kehutanan yang kompeten dalam melaksanakan pembangunan kehutanan. Dengan demikian penyuluh kehutanan harus diperankan dalam melakukan penyuluhan pada semua bidang kehutanan. Dengan kata lain setiap aspek pembangunan kehutanan memerlukan dukungan penyuluhan. Karenanya setiap aspek pembangunan kehutanan memerlukan sumberdaya manusia yang harus selalu ditingkatkan aspek pengetahuannya, kemampuannya, dan sikap kerjanya agar tahu, mau dan mampu melakukan kegiatan kehutanan dengan sebaik-baiknya. Dukungan kebijakan lainnya datang dari UU Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, di mana penyuluhan kehutanan diposisikan untuk menyiapkan sumberdaya manusia dan modal sosial agar pembangunan kehutanan semakin maju dan berkelanjutan. Penyuluhan kehutanan menjadi faktor penting dalam keberlanjutan pembangunan kehutanan.

Selain itu terdapat pula kebijakan berupa Permenhut Nomor : P.29/Menhut-II/2013 tahun 2013 tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan, yang mengamanatkan bahwa tenaga pendamping kegiatan

pembangunan kehutanan adalah penyuluh kehutanan berstatus PNS, penyuluh kehutanan yang berasal dari swasta dan tenaga lain yang kompeten untuk melakukan pendampingan. Dalam berbagai petunjuk pelaksanaan kegiatan pendamping kegiatan kehutanan diantaranya adalah penyuluh kehutanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyuluh kehutanan adalah sebagai berikut:

1) Umur

Kinerja akan merosot dengan bertambahnya usia. Pekerja tua dianggap kurang luwes dan menolak teknologi baru, namun begitu pekerja tua punya pengalaman, etos kerja yang kuat dan komitmen terhadap mutu. Umur berbanding terbalik terhadap pengunduran diri, dimana pekerja yang tua lebih kecil kemungkinan untuk berhenti bekerja. Umur sangat berpengaruh terhadap produktivitas, dimana individu yang memiliki umur semakin tua pekerja tenaganya semakin merosot produktivitasnya, karena itu menyebabkan berkurangnya keterampilan, kecepatan, kecekatan, kekuatan serta koordinasi menurun dengan berjalannya waktu. Berdasarkan kajian diatas berarti dapat dikatakan bahwa semakin tua umur tenaga kerja semakin berkurang kinerjanya.

Semakin tua individu semakin kecil kemungkinan baginya untuk berhenti maupun keluar dari pekerjaannya. Hal ini tidak mengherankan karena semakin tua seseorang, maka semakin sedikit alternatif kesempatan kerja. Selain itu semakin tua seseorang individu, berarti masa jabatan mereka juga sudah panjang, dimana hal ini cenderung memberikan mereka kompensasi yang relatif baik berupa gaji yang relatif tinggi, paket wisata yang menarik, maupun paket pensiun yang baik.

Banyak orang percaya bahwa produktivitas akan menurun seiring dengan bertambahnya usia karena melemahnya kekuatan yang dimiliki oleh seorang individu.

2) Jenis Kelamin

Wanita lebih mematuhi wewenang sedang pria lebih agresif dan lebih besar kemungkinannya dalam memiliki pengharapan untuk sukses. Tidak ada perbedaan berarti dalam produktivitas pekerjaan antara pria dan wanita, dan tidak ada bukti yang menunjukkan jenis kelamin karyawan mempengaruhi kepuasan kerja. Wanita mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya. Pada masyarakat yang menekankan perbedaan jenis kelamin dan memperlakukan mereka sangat berbeda, ada beberapa perbedaan dalam bidang-bidang tertentu yang dijadikan dasar pandangan seperti agresivitas dan perilaku sosial.

3) Pendidikan

Pendidikan merupakan proses pembelajaran melalui proses dan prosedur yang sistematis yang terorganisir baik teknis maupun manajerial yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Pendidikan mempunyai fungsi penggerak sekaligus pemacu terhadap potensi kemampuan sumberdaya manusia dalam melakukan prestasi kerjanya, dan nilai kompetensi seorang pekerja dapat dipupuk melalui program pendidikan, pengembangan dan pelatihan. Pendidikan merupakan upaya untuk menjadikan sumberdaya manusia yang lebih baik, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian. Pendidikan berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang diperlukan oleh suatu instansi atau organisasi sehingga cara pekerjaannya pada kemampuan psikomotor menjadi baik.

Pendidikan dengan berbagai programnya mempunyai peranan penting dalam proses memperoleh dan meningkatkan kualitas kemampuan profesional individu. Melalui pendidikan seseorang dipersiapkan untuk memiliki bekal agar siap tahu, mengenal dan mengembangkan metode berpikir secara sistematis agar dapat memecahkan masalah yang akan dihadapi dalam kehidupan dikemudian hari.

4) Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi setiap ragam stimulus yang berbeda, memahami beragam konsep, pikiran bahkan cara pemecahan terhadap masalah tertentu, sehingga pengertian tahu tidak hanya sekedar mengemukakan dan mengucapkan apa yang di ketahui, tetapi sebaliknya dapat menggunakan pengetahuan dalam praktek dan tindakannya. Tindakan yang dilakukan berdasarkan pengetahuan akan langsung dirasakan manfaatnya dibandingkan dengan tindakan tanpa didasari pengetahuan. Pengetahuan terjadi pada saat atau unit pengambil keputusan lainnya, kontak dengan inovasi dan mendapatkan suatu fungsi inovasi tersebut. Jadi fungsi pengetahuan pada intinya bersifat kognitif atau sekedar mengetahui.

Pengetahuan merupakan aspek perilaku, yang terutama berhubungan dengan kemampuan mengingat materi yang dipelajari dan kemampuan mengembangkan intelegensia. Unsur-unsur perilaku pengetahuan tersebut termasuk dalam golongan aspek perilaku pengetahuan dan kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat dari suatu yang telah dilakukan atau yang dipelajari

5) Persepsi

Persepsi memberikan makna pada stimulasi inderawi. Hubungan sensasi dan stimuli sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi, walaupun begitu, menafsirkan makna informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, espektasi, motivasi dan memori sebagai proses dimana individu memberi arti terhadap lingkungan. Sesuatu yang sama dilihat dengan cara yang berbeda maka akan dihasilkan arti yang berbeda. Persepsi sebagai proses dari seseorang dalam memahami lingkungannya yang melibatkan pengorganisasian dan penafsiran sebagai rangsangan dalam suatu pengalaman psikologis. Persepsi membantu individu dalam memilih, mengatur, menyimpan dan menginterpretasikan rangsangan menjadi dunia yang utuh dan berarti dan mengorganisasikan dan menafsirkan kesan kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Perilaku individu didasarkan pada persepsinya mengenai apa realitas itu, bukan mengenai realitas itu sendiri.

6) Keterampilan

Keterampilan dapat diperoleh melalui pendidikan formal, non formal, dan informal. Pendidikan formal misalnya sekolah dan pendidikan non formal diperoleh dari luar sekolah. Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengalaman hidup sehari-hari secara sadar maupun tidak sadar, sepanjang hidupnya, di dalam lingkungan keluarga, masyarakat atau dalam lingkungan pekerjaan sehari-hari. Keterampilan merupakan kemampuan seseorang menerapkan pengetahuan kedalam bentuk tindakan seseorang pada waktu yang tepat. Keterampilan seorang karyawan diperoleh melalui pendidikan dan latihan. Ada beberapa manfaat yang diperoleh

dengan adanya pendidikan dan latihan yaitu (a) membantu individu untuk dapat membuat keputusan dan pemecahan masalah secara baik, (b) internalisasi dan operasionalisasi motivasi kerja, prestasi, tanggung jawab, dan kemajuan, (c) mempertinggi rasa percaya diri dan pengembangan diri dan (d) membantu mengurangi rasa takut dalam menghadapi tugas-tugas baru.

7) Motivasi

Motivasi menentukan kegunaan dan arah perilaku, kecenderungan untuk bertindak dalam mencapai kebutuhan tertentu yang belum terpenuhi, suatu dorongan internal untuk memuaskan kebutuhan yang belum terpenuhi dan kemauan untuk mencapainya yang mendorong manusia memuaskan kebutuhannya. Motivasi sebagai proses-proses atau faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang bertindak atau berperilaku dengan cara-cara tertentu. Proses motivasi meliputi (a) identifikasi terhadap kebutuhan yang tidak memuaskan, (b) pembentukan suatu tujuan yang dapat memuaskan kebutuhan dan (c) menentukan tindakan yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan. Motivasi mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan sesuatu kegiatan guna mencapai tujuan.

Di dalam diri seseorang, terdapat dua jenis kekuatan sebagai pendorong motivasi pertama kekuatan yang bersifat positif keinginan, hasrat, atau kebutuhan yang mendorong seseorang kearah obyek atau kondisi tertentu. Kedua, yang bersifat negatif kekhawatiran, tidak suka atau menolak yang mendorong seseorang menjauh dari obyek atau kondisi tertentu. Motivasi juga merupakan faktor penting dalam mendorong terbentuknya kompetensi. Faktor motivasi dalam lingkungan pekerjaan adalah pekerjaan itu sendiri, pencapaian, pertumbuhan, tanggung jawab,

kemajuan dan pengakuan. Kesemuanya ini termasuk motivator ekstrinsik. Bagi penyuluh pertanian, beberapa hal yang menjadi motivator antara lain: pengembangan potensi diri, pengakuan petani, adanya tambahan materi sebagai akibat logik dari fungsi perannya, adanya kesempatan untuk berprestasi dan adanya keinginan untuk berkuasa atau memiliki pengaruh.

8) Sikap

Sikap sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluatif mengenai obyek, orang atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu. Dalam organisasi, sikap itu penting karena mereka mempengaruhi perilaku, perasaan positif atau negatif atau keadaan mental yang selalu disiapkan, dipelajari, dan diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh khusus pada respon seseorang terhadap orang, obyek-obyek, dan keadaan. Sikap adalah determinan perilaku, sebab sikap berkaitan dengan persepsi, kepribadian dan motivasi. Sikap merupakan respon evaluatif atau suatu bentuk evaluasi atau suatu kesiapan perasaan yang mendukung terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Respon hanya akan terjadi apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki timbulnya reaksi individual. Respon evaluatif berarti bahwa bentuk respon yang dinyatakan sebagai sikap itu didasari oleh proses evaluasi dalam diri individu, yang diungkapkan dalam bentuk baik atau buruk. Positif atau negatif, menyenangkan atau tidak menyenangkan, suka atau tidak suka.

Dilihat dari strukturnya sikap terdiri atas tiga komponen yang saling menunjang yaitu, komponen kognitif, komponen afektif dan komponen konatif. Komponen kognitif berupa apa yang di percayai oleh subyek pemilik sikap, komponen afektif

merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional dan komponen konatif merupakan kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki subyek.

9) Jarak Tempat Tinggal

Jarak adalah jauh antara dua benda atau tempat, sedangkan tempat tinggal adalah rumah yang didiami atau ditempati. Jadi jarak tempat tinggal atau jarak fisik adalah faktor pengaruh mutlak yang mempengaruhi seseorang ditempat lain. Kemampuan seseorang tidak saja disebabkan oleh potensi yang ada dalam dirinya, tetapi juga oleh faktor diluar dirinya. Terbentuknya pribadi seseorang dipengaruhi oleh lingkungannya, baik lingkungan vertikal genetika, tradisi maupun lingkungan horizontal geografik, fisik dan sosial. Perilaku manusia akan terbentuk tidak saja secara alami, tetapi juga karena faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat secara umum.

Jarak tempat tinggal juga dapat dikategorikan dalam lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja seorang penyuluh pertanian. Penyuluh yang berdomisili dan sering berinteraksi dengan petani peternak akan mempengaruhi kinerjanya dibandingkan apabila penyuluh jauh dari lokasi tugasnya sebagai seorang penyuluh pertanian. Tempat tinggal penyuluh yang terlalu jauh dengan wilayah kerja penyuluh pertanian tempat penyuluh bertugas bisa menjadi penyebab penyuluh tidak mengetahui masalah masalah yang dihadapi petani, karena petani tidak bisa menceritakan masalahnya kepada penyuluh. Selain itu, penyuluh juga akan mengeluarkan biaya yang lebih besar jika jarak tempat tinggal penyuluh dengan

wilayah kerja penyuluh pertanian, jika tempat penyuluh bertugas terlalu jauh dapat menyebabkan keterlambatan hadir penyuluh.

10) Fasilitas

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar suatu usaha atau kegiatan dapat berupa benda-benda, maupun uang atau dengan kata lain fasilitas dapat disamakan dengan sarana dan prasarana. Fasilitas yang memadai mampu menciptakan produktivitas kerja yang efisien. Suatu pekerjaan akan dikatakan efisien jika orang tersebut dapat melakukannya dengan mudah, murah, singkat waktu, ringan bebannya, dan pendek jaraknya. Kalangan dunia usaha baik instansi pemerintah maupun instansi swasta dalam melakukan usaha sangat mengandalkan fasilitas

D. Pengembangan Jejaring Kerja

Pengembangan jejaring kerja penyuluhan kehutanan dimaksudkan untuk memperoleh kesamaan persepsi agar kesepahaman dan sinergi serta hasil yang optimal dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan. Jejaring kerja dikembangkan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota, dengan dunia usaha dan masyarakat serta para pihak lainnya lembaga legislatif, lembaga yudikatif, Perguruan Tinggi, dan lain-lain. Peran PKSM adalah dengan memberikan penyuluhan tentang tata cara membuat proposal pengajuan izin HKm serta memfasilitasi kelompok tani HKm dalam pengukuran batas areal kerja di lapangan. Pengukuran areal kerja dilakukan dengan mengukur luasan batas areal kerja kelompok dengan menggunakan alat GPS dilanjutkan dengan membuat dalam bentuk sketsa areal kerja, juga melampirkan deskripsi areal kerja HKm baik tentang kondisi hutan seperti

kondisi topografi, tutupan lahan, dan potensi sumberdaya hutan. PKSM sebagai fasilitator juga berperan sebagai motivator untuk kelompok tani HKm di alapangan. Motivasi adalah proses penumbuhan motif atau dorongan, sehingga seseorang mau untuk secara sadar belajar atau berubah perilakunya.

PKSM dalam hal ini memberikan dorongan dan semangat bagi kelompok tani untuk ikut dalam pertemuan sehingga dapat membuat pikirannya terbuka untuk memahami tata cara pembuatan proposal pengajuan izin HKm. PKSM harus terus menerus mendorong kelompok tani agar ikut serta dalam pengukuran peta batas areal kerja, dan hal ini untuk kebutuhan dalam membuat proposal untuk izin HKm dan dilengkapi sehingga seluruh data proposal terpenuhi. Peran PKSM sebagai edukator adalah peran untuk memberikan edukasi atau bimbingan dalam proses belajar bagi penerima manfaat dalam hal ini adalah masyarakat sekitar hutan. PKSM dalam mengedukasi masyarakat, yaitu dengan memberi pengarahan, penjelasan, dan penjabaran tentang tata cara penataan batas areal kerja HKm serta tata cara pembuatan proposal izin HKm.

PKSM sebagai pendamping masyarakat juga berperan dalam kegiatan pengajuan izin HKm, dalam kegiatan lainnya, seperti kegiatan perlindungan hutan, rehabilitasi hutan serta lahan. Tujuan HKm menurut Kementerian Kehutanan (2014) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Atas dasar tersebut PKSM selalu berupaya mendampingi masyarakat sekitar hutan untuk melakukan pengajuan izin HKm, karena HKm sangat memberikan manfaat yang banyak baik dari segi ekonomi, sosial, maupun ekologi.

Adanya izin HKm membuat masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam hutan apa saja yang telah ditentukan dalam penyelenggaraan HKm sehingga masyarakat akan tetap menjaga kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Dalam rangka pengembangan jaringan Sistem Informasi Manajemen penyuluhan kehutanan, untuk laporan semester dan tahunan pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan kabupaten/kota, serta laporan semester dan tahunan pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan propinsi masing-masing selain dilaporkan kepada Bupati/Walikota/Gubernur juga tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan.

E. Forum Komunikasi Penyuluhan Kehutanan

Forum Komunikasi Penyuluhan Kehutanan merupakan wadah bersama yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur para pihak antara lain pemerintah (instansi/dinas terkait), lembaga perguruan tinggi bidang penelitian, lembaga legislatif dan yudikatif, dunia usaha, masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat, perlu saling berinteraksi dan bersinergi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan. Forum dibentuk secara mandiri dan atas kesadaran serta partisipasi para anggota berdasarkan kesepakatan bersama dan saling menguntungkan. Pembentukan Forum dapat dilakukan baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dan bersifat sejajar.

F. Sumberdaya Pendukung

a. Sumber dana penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.

Sumber dana dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan adalah berasal dari APBD, pemerintah pusat, provinsi, Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBN Rutin, APBN Sektoral, APBN-PNBP, APBD Provinsi, APBD, LSM Kabupaten/Kota juga bersumber dari dunia usaha, bantuan luar negeri, dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah pusat maupun provinsi mengalokasikan pendanaan yang bersifat bantuan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan kehutanan di wilayah kabupaten/kota.

b. Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan

Pengembangan sarana prasarana di wilayah pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota bersumber dari anggaran APBD yang bersangkutan. Untuk memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana serta alat bantu dalam kegiatan penyuluhan kehutanan di daerah dapat dikembangkan dari partisipasi dunia usaha, swasta, LSM, dan para pihak lainnya sebagai penyelenggara penyuluhan kehutanan, dan kerjasama yang berasal dari bantuan luar negeri.

c. Standar dan Kriteria

Standar dan kriteria dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan yang meliputi sistim kelembagaan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta pengendalian penyuluhan kehutanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang Nomor : 8206/Kpts-II/2002 tentang Standar dan Kriteria Penyuluhan Kehutanan.

BAB VII

PENUTUP

Hutan sebagai aset pembangunan nasional sangat penting dan bermanfaat bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Oleh karena itu, hutan harus dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan secara baik dan lestari demi kesejahteraan masyarakat. Kawasan hutan saat ini telah mengalami kerusakan yang serius dengan kondisi hutan tidak berdaya dan masyarakat rentan dengan kemiskinan.

Pemberdayaan dilakukan dengan serangkaian proses yang telah ditetapkan oleh pihak yang bersangkutan, karena tujuan pemberdayaan untuk memberikan sebuah daya kepada sekelompok masyarakat yang dalam kategori lemah dan identik dengan masyarakat miskin, sehingga kekuatan yang diberikan kepada masyarakat harus sesuai dengan tujuan yang diharapkan dengan cara dan proses yang tepat, karena akan mempengaruhi kelanjutan hidup masyarakat.

Salah satu masyarakat yang perlu untuk diberdayakan, adalah masyarakat desa disekitar hutan. Masyarakat desa sekitar hutan merupakan masyarakat yang bermukim di daerah dekat dengan kawasan hutan, dimana masyarakat tersebut memiliki interaksi ataupun hubungan yang kuat dengan kawasan hutan dikarenakan masyarakat memperoleh kebutuhan perkonomiannya melalui pemanfaatan potensi hutan.

Masyarakat hutan yang identik dengan tingkat perekonomian dan pendidikan yang rendah, memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhannya dengan bergantung terhadap sumberdaya hutan. Tingkat pendidikan yang rendah membuat mereka tidak terampil dalam melakukan aktivitas yang tidak pernah mereka dengar dan ketahui. Begitu juga dalam hal pengelolaan hutan yang dekat dengan rumah mereka. Keterbatasan pengetahuan masyarakat sekitar hutan, membuat mereka mengelola hutan secara sembarangan.

Masyarakat sekitar hutan cenderung memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dengan cara yang tidak baik. Tidak baik disini artinya, mengambil sumberdaya hutan dengan cara merambah. Merambah yang dilakukan masyarakat disini yaitu menebang pohon-pohon ataupun tumbuhan-tumbuhan yang berada di dalam hutan tanpa memperbaiki hutan itu kembali. Merambah secara sembarangan jelas memiliki makna yang negatif bagi hutan

Pengetahuan yang rendah mengenai pengelolaan hutan yang ada, juga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui cara untuk mengelola hutan yang baik dan benar. Dari kegiatan merambah hutan secara sembarangan yang diperbuat oleh masyarakat sekitar hutan, maka timbulah masalah kerusakan hutan. Padahal hutan adalah salah satu lingkungan yang perlu dijaga kelestariannya. Lingkungan merupakan salah satu unsur yang penting bagi kehidupan makhluk hidup, baik itu manusia, binatang, dan tumbuhan. Lingkungan menjadi penentu bagaimana makhluk hidup tersebut berkembang di dalamnya. Lingkungan menjadi tempat untuk segala bentuk kegiatan makhluk hidup di dalamnya. Maka dari itu menjaga kelestarian sebuah lingkungan merupakan hal yang penting bagi kita semua makhluk hidup.

Salah satu lingkungan yang perlu dijaga kelestariannya adalah hutan. Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berbentuk hamparan lahan yang tersusun atas sumberdaya alam hayati yang didominasi oleh pohon-pohonan dalam kesatuan alam lingkungannya, antara satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Jika kondisi hutan menjadi buruk karena ulah manusia, maka sebaiknya yang diperbaiki disini adalah manusia sebagai salah satu oknum yang ikut membuat keadaan hutan menjadi tidak lestari.

Kebijakan Hkm mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan. Sekarang kebijakan mengenai HKm telah diperbaharui dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.Meskipun begitu, masih mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan. HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan serta kemandirian masyarakat agar mampu mendapatkan, memanfaatkan sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka kesejahteraan masyarakat. HKm dan pemberdayaan masyarakat dibuat agar masyarakat bisa mengelola hutan secara mandiri dan memperoleh manfaat sumberdaya hutan secara adil dan optimal. Sehingga melalui HKm, akan menciptakan masyarakat yang sejahtera, dan pastinya menjaga kekayaan flora dan fauna yang telah ada. HKm dibuat agar masalah berupa

perambahan hutan secara sembarangan yang tidak bertanggung jawab dapat diatasi dengan memberdayakan masyarakat untuk mengelola hutan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat desa kawasan hutan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat serta mampu mengadopsi inovasi dibidang kehutanan.

Pemberdayaan dalam bidang pendidikan, merupakan proses penyadaran baik penyadaran tentang keberadaannya, masalah-masalah yang dihadapi, kebutuhan untuk memecahkan masalah peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan serta penyadaran tentang pilihan-pilihan yang terbaik untuk diri sendiri dan masyarakatnya. Proses pemberdayaan merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui kolektif dan kerjasama yang aktif sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. 2013. *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press .
- Ahmadi Abu, 1991. *Psikologi Perkembangan*. Rineka Cipta
- Ansori, M. 2012. *Partnership Forest Management for the Prosperity of Community around Forest (Case of Community Based Forest Management Model in BKPH Parung Panjang, KPH Bogor)*. Dissertation. Bogor Agricultural University.
- Anwar, S., and I.Hakim. 2010. *Social Forestry, Lead to the Restoration of Sustainable Forestry Development*. Center for Climate Change and Development Policy Research : Ministry of Forestry Bogor.
- Arief, Arifin. 2001. *Hutan Dan Kehutanan*. Yogyakarta, Kanisius.
- Agrawal, A. 2007. *Forest, governance and sustainability: common property theory and its contribution*. *International Journal of the Commons*, 1(1), 111-136. doi: <https://doi.org/10.18352/ijc.10>
- Antinori, C., & Bray, D.B. 2005. *Community forest enterprises as entrepreneurial Firms: Economic and institutional perspectives from Mexico*. *World Development*, 33, 1529-1543. doi:<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.10.011>
- Asmin, F., Darusman, D., Ichwandi, I., & Suharjito, D. 2016. *Local ecological knowledge on forest clearing: A case study of parak and rimbo practices in Simancuang Community, Indonesia*. *Komunitas : International Journal of Indonesian*

Society and Culture, 8(2), 208-220 doi:<https://doi.org/10.15292/komunitas.v8i2.5856>

- Asmin, F., Darusman, D., Ichwandi, I., & Suharjito, D. 2017a. Elaborating the attribute of local ecological knowledge : A case study of park and rimbo practises in Koto Malintang Village. *Advanced Science Letters*, 23(4), 2812-2817. doi: <https://doi.org/10.1166/asl.2017.7682>
- Awang, S, Afri. (2008) *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan*. Jakarta, Harapan Prima
- Awang, S.A. 2007. *Politik Kehutanan Masyarakat*. Center for Critical Social Studies (CCSS) dan Kreasi Wacana. Yogyakarta.
- Azadi, H., Filson, G., 2009. Comparative study of agricultural extension systems: A systemic view. *Outlook on Agriculture* 38(4), 337-347.
- Azadi, H., van den Berg, J., Ho, P., Hosseininia, G., 2009. Sustainability in rangeland systems: Introduction of Fuzzy Multi Objective Decision Making. *Current World Environment* 4, 19-32.
- Bartle, Phil, 2003, *Key Words C of Community Development, Empowerment, Participation*: <http://www.scn.org/ip/cds/cmp/key-c.htm>).
- Bizikova, L., M. Nijnik, and, T.K. Oravska (2012) Sustaining Multifunctional Forestry through the Development of Social Capital And Promoting Participation. A Case of Multiethnic Mountain Communities. *Small-scale Forestry* 11, 301-319

- Baynes, J., Herbohn, J., Smith, C., Fisher, R., & Baray, D. 2015. Key factors which influence the succes of community forestry in developing countries. *Global Environtmental Change*, 35 (November) 226-238. doi:<https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.09.011>
- Berg, B.L. 2001. *Qualitativ Research Methods for the Social Science*. Boston: A Pearson Education Company. Doi:<http://doi.org/10.2307/1317652>
- Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Black, A.W., Forge, K., Frost, F., 2000. Extension and advisory strategies for Agroforestry. RIRDC Publication No 00/184. RIRDC Project No. ECU-2A. Rural Industries Research and Development Corporation.
- Baynes, J., Herbohn, J., 2011. Self-directed learners or not? Delivering agroforestry technology to farmers in the Philippines. In: Recent advances in land owner extension. Heimo Karppinen, Teppo Hujala and Outi Virkkula (eds.). Working Papers of the Finnish Forest Research Institute, 30-38.
- Braeutigam, D., 2003. *Community Based Forest Management in Cambodia and Laos. Frame Conditions, Selected examples and Implications*. MRC-GTZ Cooperation Programme. Available online: <http://tnmckc.org/upload/document/aifpws/2/2.1%20BraeuD%20CF%20Cambodia%20Laos%20WP%203%20031125.pdf>

- Brown de Colstoun, E.C., Story, M.H., Thompson, C., Commisso, K., Smith, T.G., Irons, J.R. 2003. National Park vegetation mapping using multitemporal Landsat 7 data and a decision tree classifier. *Remote Sensing of Environment* 85, 316-327.
- CERD, 2004, *Community Empowerment for Rural Development*, <http://www.cerd.or.id>
- Chang, I-Shin; Wu, Jing, 2011. Planning and Rationalization of Public Participation in China's Environmental Management. *Management Science and Engineering*, Volume 5, Number 1, page 37-50.
- Chen, H., T. Zhu, M. Krott, dan D. Maddox (2012) Community Forestry Management and Livelihood Development in Northwest China, Integration of Governance, Project Design, and Community Participation. *Reg. Environ. Change*13(1), 67-75.
- Cook, James B, 1994, *Community Development Theory*, Community Development Publication MP568, Dept. of Community Development, University of Missouri-Columbia).
- Creswell, J.W. 2008. *Educational Research : Planning, Conducting, And Evaluating Quantitative And Qualitative Research*. New Jersey Pearsonn
- Cubbage, F.W., and K.A. Mc Ginley. 2018. Indicator 7.51: Development and application of research and technologies for the sustainable management of forests. In *National report on sustainable forests: 2015*. USDA Forest Service, Washington, DC. Forthcoming 2018.

- Damanik, Sarintan, E., 2019. Perencanaan Pembangunan Kehutanan, Uwais Inspirasi Indonesia, Jatim.
- Dewi, I.N. 2017. Kemiskinan dan penanggulangannya melalui program kehutanan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta Pusat Studi Ilmu Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Disertasi. Tidak diterbitkan.
- Dirjen PSKL. 2016. Pesona. Perhutanan Sosial Nusantara. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
- Dove, M.R. 1995. The Theory of Social Forestry Intervention. The State of the Art in Asia. System on the Environment. Agroforestry Systems 30, 315-340.
- Eko, Sutoro 2004. Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: APMD Press
- Fauzi.H.2012. Pembangunan Hutan Berbasis Kehutanan Sosial. Karya Putra.Semarang.
- Fang, Hong; Zhou, Hongmin, 2010. Discussion on Strategies of Development and Application of Human Resources. Asian Social Science, Volume 6, Number 3, page 12-16.
- Fisher, R., R. Prabhu, and C. McDougall, 2007. Introduction, People, Forests and the Need for Adaptation. Adaptive Collaborative Management of Community Forests in Asia, Experience From Nepal, Indonesia, and the Philippines. CIFOR: Bogor.
- Forestry and Plantation Agency of Mesuji Regency, 2012. Strategic Plans. Mesuji Regency of Lampung (in Indonesian).

- Ghose, Ajit, Griffin, Keith, 1980. Rular Poverty and Development Alternative in South and Souteast Asia, Sone Policy Issues Development. New York : Mc Groww Jill Book
- Grguric, Ivan, 2009. Regional Economic Policy in Europe. Financial Theory and Practice, Volume 33, Number 4, page 489-492.
- Hujala, T., Tikkanen, J., Hanninen, H., & Virkkula, O., 2009. Family forest ownwrs 'perception of decision support. Scandinavian Journal of Forest Research, 24, 448-460. doi:<https://doi.org/10.1080/02827580903140679>
- Husain, S., & Kinasih, S. 2010. Pasang sebagai modal sosial pengelolaan hutan pada masyarakat Ammatowa. Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik, 23(3), 229-235
- Heisey, P.W., S.L. Wang, and K. Fuglie. 2011. *Public agricultural research spending and future US agricultural productivity growth: Scenarios for 2010–2050*. Economic Brief No. 17. USDA Economic Research Service, Washington, DC. 6 p.
- Idi, Abdullah. 2011. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Johnson, J. E. 2003. Coordinating international Extension efforts in forestry: The IUFRO Extension Working Party. *In Bridging the gap between forestry research and practice--The role of the communicator*. Proceedings of the Nordic Forum on Forestry Communication, E.J. Nielsen (Editor). June 1-4, 2003. Sigulda, Latvia. Danish Forest and Landscape Research Institute, Hoersholm, Denmark. Pp. 16-18.
- Josiah, J. H. 2001. Approaches to expand NGO natural resource conservation program outreach. *Society and Natural Resources* 14:609-618.

- Khairuddin. 1992. *Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek: Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan*, Liberty, Yogyakarta
- Koentjaraningrat. 1984. *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Kartasasmita, G., 1997, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*, Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan untuk rakyat, memadukan pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : CDES
- Kloster, D., & Masera, O. 2000. Community forest management in Mexico : Carbon mitigation and biodiversity conservation through rural development. *Global Environmental Change*, 10(4), 259-272. doi: [https://doi.org/10.1016/S09-3780\(00\)00033-9](https://doi.org/10.1016/S09-3780(00)00033-9)
- Kemen LHK. 2015. *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Doi:<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Lachapelle, Paul R. et all. 2004. *Access to Power or Genuine Empowerment? An Analysis of Three Community Forest Groups in Nepal*.
- Mahanty, S., Gronow,J., Nurse, M., & Malla, Y., 2006. Reducing poverty through community based forest management in Asia. *Journal of Forest and Livelihood*, 5(1), 78-89 doi:<https://doi.org/10.3126/jfl.v5i1.1983>
- Ministry of Forestry 2004. *Minister of Forestry Regulation No: P.01/Menhut-II / 2004. Local Community Empowerment in*

or around the Forest Area in the Framework of Social Forestry: Jakarta.

- Mishra, Sudhanshu, 2010. On Harnessing Natural Resources For Sustainable Development. *Journal of Environmental Management and Tourism*, Volume 1, Number 1, page 12-21.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mercer, D. E. 2004. Adoption of agroforestry innovations in the tropics: a review. *Agroforestry Systems* 61(1):311-328.
- Muok, B., Owuor, B., & Kaudia, A. A. (1998). Forestry Extension in semi-arid Kitui, Kenya: Approaches and challenges. In *Forestry Extension: Science and practice for the 21st century*. Proceedings of the International Union of Forestry Research Organizations Symposium. R. Beck (Editor). September 7-12, 1997. Nairobi, Kenya. Ludwig Maximilians University Publications No. 2. Munich, Germany. Pp. 135-147.
- Pagdee, A., Kim, Y., & Daugherty, P.J., 2006. What makes community forest management succesfull: A meta-study from community forest throughout the world. *Society & Natural Resources* 19(1), 33-52. doi:<https://doi.org/10.1080/08941920500323260>.
- Pandey, G.S., & Paudyall, B.R. 2015. Protecting forest, improving livelihoods-Community forestry in Nepal. *Regional Development Dialouge*. Nepal. doi:<https://doi.org/10.3126/hjs.v1i1.190>

- Porter-Bolland, L., Ellis, E.A., Guariguata, M.R., Ruiz-Mallen, I. Negrete-Yankelevich, S., & Reyes Gracia, V., 2012. Community managed forests and forest protected areas: An assessment of their conservation effectiveness across the tropics. *Forest Ecology and Management* 268, 6-17. doi:<https://doi.org/10.1016/j.foreco.211.05.034>.
- Polansky, C., & Heermans, J. 2004. Developing forest management plans with high-tech tools and traditional knowledge in Zambia. *Journal of Forestry*. pp. 46-51.
- Rozaki, et. al. 2006. *Kaya Proyek Miskin Kebijakan: Membongkar Kegagalan Pembangunan Desa*. Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta: Yogyakarta.
- Suharto, Edi 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama
- Sunam, Ramesh K. et al. 2010. Can bureaucratic control improve community forestry governance" An analysis of proposed Forest Act Amendment
- Suparjan and Suyatno, Hempri, 2003. *Pengembangan Masyarakat: dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Penerbit Aditya Media.
- Sri Esti Wuryani Djiwandono, 2005. *Konseling dan terapi dengan Anak dan Orang Tua*, Jakarta: PT.Grasindo
- Suryadi, Ace. 1993. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung.

- Sjafari, Agus dan Sumaryono GS. (2012). *Pembangunan Masyarakat:Teori dan Implementasi di Era Otonomi Daerah*. Serang-Banten: Fisip Untirta Press.
- To, X. P., & Tran, H.N. 2014. *Forest Land Allocation in the Context of Forestry Sector Restructuring: Opportunities for Forestry Development and Upland Livelihood Improvement*. Hue City: Tropenbos International Viet Nam. Retrived from http://forest-trends.org/document.file/doc_4826.pdf
- Tilaar, H.A.R., *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Globalisasi*. Jakarta: Grasindo, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Treue, T., Ngaga, Y. M., Meilby, H., Lund, J. F. Kajembe, G., Iddi, S.,...Burgess, N. D. 2014. Does participatory forest management promote sustainable forest utilisation in Tanzania? *International forest management promote sustainable forest utilisation in Tanzania? International Forestry Review*, 16(1), 2338. <https://doi.org/10.1505/146554814811031279>
- Weatherley-Singh,J., &Gupta, A. 2015. Drivers of deforestation and REED+benefit-sharing: A meta-analysis of the (missing) link. *Environmental Science & policy*, 54,97-105. doi:<https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.06.017>
- Vodouhe, F.G., Coulibaly, O.,Adegbidi, A., & Sinsisn, B. 2010. Community perception of biodiversity conservation within protected area in Benin. *Forest Policy and Economic*, 12(7), 505-512. doi:<https://doi.org/10/j.forpol.2010.06.008>

Wakiyama, T. 2004. Community Forestry in Nepal: A Comparison of Management System between Indigenous Forestry and Modern Community Foerstry. Policy Trend Report. Retrieved from http://www.iges.or.jp/en/fc/pdf/report11/full_text.pdf.

TENTANG PENULIS



Dr. Sarintan Efratani Damanik, S.Hut, M.Si., adalah dosen pada Univeristas Simalungun (USI). Lahir di Kota Pematangsiantar 19 April 1971. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Kehutanan S-1 tahun 2001 di Universitas Simalungun (USI). Gelar Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan diperoleh tahun 2007 di Universitas Andalas (UNAND) Padang. Gelar Doktor Perencanaan

Wilayah diperoleh tahun 2017 di Universitas Sumatera Utara (USU). Saat ini mengampu beberapa matakuliah pada jenjang S1 dan S2, pada Sekolah Pascasarjana USI mengajar di Program Perencanaan Wilayah dan Kota.

Buku yang telah diterbitkan adalah Perencanaan Pembangunan Kehutanan. Beberapa karya ilmiah lain berupa makalah yang berskala nasional maupun internasional dapat ditemukan di Perpustakaan USI. Sementara itu suatu buku yang berjudul Perencanaan Perkotaan Ekologis masih dalam persiapan untuk diterbitkan.